



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA BAHARI
GUNA Mendukung INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
(STUDI DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL)**

TESIS

**KRISNAWAN NINDITO
120160205013**

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PRODI KEAMANAN MARITIM
BOGOR
OKTOBER 2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Bila dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku.

Bogor, Oktober 2018

Krisnawan Nindito

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Krisnawan Nindito
NIM : 120160205013
Program Studi : Keamanan Maritim
Fakultas : Keamanan Nasional
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Nonexclusive Royalti-Free Right*) atau karya ilmiah saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA BAHARI
GUNA MENDUKUNG INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
(STUDI DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL)

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari Tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Oktober 2018

Krisnawan Nindito

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan tesis dengan judul: Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Guna Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia (Studi di Kabupaten Gunung Kidul).

Penulisan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Letnan Jenderal TNI I Wayan Midhio, M.Phil selaku Rektor Keempat Universitas Pertahanan Indonesia;
2. Mayor Jenderal TNI Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A selaku Rektor Universitas Pertahanan;
3. Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri , S.T., M.MT selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional;
4. Laksamana Pertama TNI Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Kolonel Sus Dr. IDK Kertawidana, MKKKK selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dalam penulisan Tesis;
5. Kol. Laut (P) Purwanto, M.Si(Han) selaku Sekretaris Program Studi Keamanan Maritim beserta Staff;
6. Seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan informasi untuk bahan penulisan Tesis ini;
7. Bapak, Ibu dan Kakak tercinta, serta seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan motivasi;

8. Rekan-rekan seperjuangan KM Cohort 4, yang telah menjadi keluarga dan sahabat saat dan setelah menjadi mahasiswa UNHAN, semoga kita semua menjadi keluarga dan sahabat yang tidak terpisah;
9. Rekan-rekan Tim Olah Raga UNHAN yang selalu memberikan semangat berolahraga di Sport Hall PMPP, semoga sehat selalu dimanapun berada.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan saran yang membangun demi menunjang kesempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan manfaat bagi *stakeholder* terkait.

Bogor, Oktober 2018

Krisnawan Nindito

ABSTRAK

Nama : Krisnawan Nindito
NPM : 120160205013
Program Studi : Keamanan Maritim
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Guna Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Yogyakarta. Gunung Kidul mempunyai kondisi geografis dengan panjang pantai terpanjang di Yogyakarta. Wisata bahari di Gunung Kidul menjadi wisata unggulan yang dapat memberikan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pemerintah daerah. Indonesia mempunyai visi menjadi Negara yang berdaulat, maju, kuat dan mandiri di bidang kemaritiman, yang dikenal dengan istilah Poros Maritim Dunia. Kebijakan pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut tidak bisa terlepas dari kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan daerahnya. Pengembangan wisata bahari menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah untuk mewujudkan kemaritiman yang kuat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan wisata bahari di kabupaten Gunung Kidul untuk mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil yang didapat yaitu pengembangan wisata bahari di Kabupaten Gunungkidul merupakan implementasi dari kebijakan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dimana pemerintah ingin sejalan dengan visi pemerintah pusat, yang ingin memperkuat bidang kemaritiman. Dilihat dari responsivitas masyarakat terhadap kebijakan yang ada, masyarakat (pokdarwis) sangat mendukung adanya kebijakan pengembangan wisata bahari di kabupaten Gunung Kidul.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, wisata bahari, poros maritim dunia

ABSTRACT

Name : Krisnawan Nindito
NPM : 120160205013
Program Study : Maritime Security
Title : *Implementation of Marine Tourism Development Policy to Support Indonesia As a Global Maritime Fulcrum*

Gunung Kidul is one of the district in Province of Yogyakarta. Gunung Kidul has the longest beach in Yogyakarta. Marine tourism in Gunung Kidul is a superior tourism that can provide local revenue (PAD) for local government. Indonesia has a vision to be a sovereign, advanced, strong and independent country in the maritime field, known as the Global Maritime Fulcrum. Government policy in realizing this vision cannot be separated from the policies of local governments in increasing their regions. The development of marine tourism is one of the sectors that is the government's attention to realize a strong maritime. The purpose of this study is to analyze the implementation of local government policy in the development of marine tourism in Gunung Kidul to support Indonesia as the global Maritime Fulcrum. The method used in this research is qualitative with a case study approach. The results shows that development of marine tourism in Gunungkidul is an implementation of the policy of the Governor of DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, where the government wants to be in line with the vision of the central government, which wants to strengthen the maritime sector. Based on, responsiveness of the community to the existing policies, the community (Pokdarwis) strongly supports the policy to developing marine tourism in Gunung Kidul.

Keywords: *policy implementation, marine tourism, global maritime fulcrum*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	6
1.5. Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
2.1. Tinjauan Pustaka.....	8
2.1.1. Pariwisata dan Wisata Bahari.....	8
2.1.2. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (<i>Sustainable Tourism Development</i>)	11
2.1.3. Konsep Keamanan Maritim	12
2.1.4. Teori Kebijakan	15
2.1.5. Teori Implementasi.....	15
2.1.6. Penelitian Terdahulu	25
2.2. Kerangka Pemikiran	27
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	29
3.1. Desain Penelitian.....	29
3.2. Sumber Data, Subjek, dan Objek Penelitian	30

3.2.1. Sumber Data	30
3.2.2. Subjek Penelitian	30
3.2.3. Objek Penelitian	31
3.4. Teknik Analisis Data dan Interpretasi Data	32
3.5. Prosedur Penelitian	33
3.5.1. Instrumen Penelitian.....	33
3.5.2. Pengujian dan Keterandalan Data.....	33
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Hasil Penelitian	35
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul.....	35
4.1.1.1. Letak Geografis.....	35
4.1.2. Sarana Dan Prasarana.....	36
4.1.3. Perekonomian	37
4.1.4. Sosial Budaya	38
4.1.2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Bahari Untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta	42
4.2. Pembahasan	63
BAB 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	66
5.1. Kesimpulan.....	66
5.2. Rekomendasi.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Matriks Keamanan Maritim	14
Gambar 2.2	Model Dasar Proses Kebijakan Kebijakan.....	16
Gambar 2.3	Sekuensi Implementasi Kebijakan	17
Gambar 2.4	Proses Implementasi Program	19
Gambar 2.5	Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III.....	20
Gambar 2.6	Kerangka Pemikiran Penelitian.....	27
Gambar 3.1	Komponen dalam Analisis Data.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 4.1	Kondisi Jala di Kabupaten Gunung Kidul 2016-2017.....	36
Tabel 4.2	Kondisi ODTW di Kabupaten Gunung Kidul.....	40

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Poros Maritim Dunia merupakan visi Indonesia untuk menjadi Negara maritim yang berdaulat, maju, kuat dan mandiri serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. Poros Maritim Dunia masih menjadi cita-cita Negara Indonesia dalam menerapkan kedaulatan dan hak berdaulat di laut dan menjaga keamanan di laut dari ancaman baik dari pihak lokal maupun asing. Negara Indonesia harus mampu memanfaatkan teknologi dalam mengelola dan mengembangkan kemampuan ke-maritiman secara terus menerus dengan tidak bergantung kepada kekuatan asing sehingga dapat bersaing dengan Negara lain dalam pemanfaatan sektor maritim (Perpres No. 16 Tahun 2017).

Arah pembangunan Indonesia dalam mencapai Poros Maritim Dunia telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Peraturan ini merupakan amanah Undang-undang No. 32 Tahun 2014 dalam melakukan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan. Peraturan ini dibuat dalam upaya percepatan tercapainya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kebijakan Kelautan Indonesia merupakan suatu dokumen nasional yang memuat uraian pedoman umum kebijakan kelautan, yang di dalamnya termuat tantangan, misi, prinsip, pilar kebijakan dan strategi utama dalam melakukan kebijakan tersebut. Terdapat tujuh pilar kebijakan kelautan yang menjadi acuan dalam melakukan pembangunan di sektor maritim Indonesia, yakni : pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan laut; tata kelola dan kelembagaan laut; ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan; pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; budaya bahari; dan diplomasi maritim.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional karena mampu menyumbang devisa Negara. Sektor Pariwisata Indonesia sebagai peringkat keempat penyumbang devisa nasional setelah minyak dan gas bumi, batu bara dan kelapa sawit. Pariwisata mampu menyumbangkan 10% PDB nasional. Namun jika dibandingkan penerimaan devisa pariwisata di Negara-negara Asia, Indonesia masih tertinggal dan berada di peringkat ke 9. Maka penting sekali Indonesia memberikan perhatian khusus di sektor pariwisatanya (Kemenpar, 2016)

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor penting yang menjadi perhatian pemerintah dalam pembangunan kelautan Indonesia sebagai upaya perwujudan Indonesia menjadi poros maritim dunia karena Indonesia mempunyai potensi sumber daya kelautan yang dapat dijadikan obyek pariwisata, yaitu wisata bahari. Wisata bahari merupakan jenis wisata yang berkaitan dengan kelautan, yang aktivitasnya dilakukan di atas permukaan laut atau di bawah permukaan laut dan juga dapat dilakukan di pesisir. Sebagai upaya peningkatan wisata bahari, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kearifan lokal serta harus memperhatikan konservasi perairan. Dalam hal ini, pengembangan pariwisata bahari harus menggunakan prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mampu memberikan manfaat terhadap masyarakat luas baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya serta mampu menjaga kelestarian dan lingkungan maritim. Pengembangan wisata bahari merupakan salah satu program utama dalam melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya kelautan yang termuat dalam Perpres No. 16 Tahun 2017.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah-selatan pulau Jawa, secara geografis terletak pada 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110° 00'-110°50' Bujur Timur, dengan luas 3.185,80 km², dan terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan satu Kota Madya. Selain terkenal sebagai kota perjuangan, pusat ke-

budayaan dan pusat pendidikan, provinsi Yogyakarta juga dikenal sebagai kota tujuan wisata. Menurut Dinas Pariwisata Yogyakarta, dari tahun 2011-2015 setiap tahunnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara ke provinsi Yogyakarta terus meningkat. Jika dilihat secara geografis, potensi wisata yang ditawarkan oleh Provinsi Yogyakarta berupa wisata alam, wisata bahari dan wisata buatan. Yogyakarta memiliki potensi wisata bahari yang besar. Daerah istimewa Yogyakarta mempunyai panjang pantai sejauh 113 km dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.

Pembangunan sektor pariwisata Indonesia telah diatur di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dimana pembangunannya dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Pemerintah Yogyakarta telah mempunyai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam melakukan pembangunan kepariwisataan di daerah Yogyakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012. Pemerintah provinsi Yogyakarta mempunyai visi menjadikan Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata yang terkemuka di Asia Tenggara dan berkelas dunia. Pengembangan wisata bahari menjadi agenda dalam pembangunan kepariwisataan daerah Yogyakarta.

Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten di wilayah Yogyakarta yang memiliki wilayah pantai terpanjang dibandingkan dengan panjang pantai di wilayah kabupaten lain. Dengan melihat kondisi ini, pemerintah kabupaten Gunung Kidul berupaya dalam mengembangkan wisata yang berbasis laut untuk meningkatkan daya tarik wisata sehingga jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun internasional akan meningkat sehingga dapat juga meningkatkan pendapatan di daerah kabupaten Gunung Kidul. Strategi pemerintah dalam melakukan peningkatan daya tarik wisata bahari dengan memfasilitasi pengembangan wisata-wisata bahari yang ada di selatan kabupaten Gunung Kidul.

Pariwisata bahari merupakan sektor yang cukup kompleks dan multidimensi sehingga pengembangannya pun melibatkan berbagai sektor dan pihak-pihak terkait. Pemerintah kabupaten Gunung Kidul dalam meningkatkan daya saing pariwisata bahari berupaya melakukan fasilitasi pengembangan wisata bahari yang berada di wilayah selatan Gunung Kidul sehingga dapat dijadikan destinasi wisata bahari yang mampu menjadi wisata unggulan di Yogyakarta. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami tantangan, seperti terbatasnya infrastruktur dan terbatasnya aksesibilitas menuju lokasi wisata tanpa didukung alternatif pilihan transportasi yang memadai. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wisata bahari di level pemerintahan terkecil seperti di wilayah kabupaten Gunung Kidul dapat menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka perlu diteliti mengenai implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Gunung Kidul dalam melakukan pengembangan wisata bahari untuk mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

1.2. Rumusan Masalah

Sektor Pariwisata di Provinsi Yogyakarta cukup dikenal wisatawan lokal maupun mancanegara. Setiap tahun jumlah wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara mengalami peningkatan, sehingga hal ini juga akan memberikan kontribusi yang positif untuk pendapatan asli daerah. Kabupaten Gunung Kidul memiliki wilayah pantai terluas dibanding dengan kabupaten lain di Yogyakarta, membuat daerah ini memiliki sumber potensi wisata bahari. Strategi Pemerintah kabupaten Gunung Kidul dalam meningkatkan daya tarik wisata dengan memfasilitasi pengembangan wisata pantainya. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang ingin memperkuat dan mengedepankan sektor maritim dan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka penerapan kebijakan pemerintah daerah terkait pengembangan wisata bahari perlu dikaji. Setiap daerah harus mengambil peran dalam melakukan pening-

katan dan pengembangan sektor maritim, seperti wisata bahari. Dengan dasar permasalahan yang ada, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian adalah:

Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wisata bahari untuk mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di kabupaten Gunung Kidul?

1.3. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian dilakukan dengan tujuan adalah:

Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan wisata bahari di kabupaten Gunung Kidul untuk mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Hasil akhir penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implementasi kebijakan pengembangan wisata bahari dalam mendukung pencapaian Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis ke-maritiman

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pertahanan, khususnya di bidang kemaritiman. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi karya ilmiah yang dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran baru atau inovasi terkait implementasi kebijakan pengembangan wisata bahari yang dilakukan di kabupaten Gunung Kidul.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian terkait implementasi kebijakan pengembangan wisata bahari. Selain itu hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang diambil oleh *stakeholder* untuk pengembangan wisata bahari di kabupaten Gunung Kidul.

1.5. Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah studi keamanan maritim mengenai perwujudan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dari aspek wisata bahari. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wisata bahari di kabupaten Gunung Kidul untuk mendukung perwujudan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Penelitian didesain dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan wawancara terhadap narasumber untuk mengumpulkan data primer dan mengumpulkan data dari berbagai dokumen. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan artikel, jurnal dan tulisan lain yang terkait dengan penelitian ini.

Sistematika penulisan dalam penelitian akan disusun menjadi lima bab yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub-bab sesuai kebutuhan penulisan, dengan uraian penulisan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini membahas tentang landasan awal penelitian, yaitu mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah yang berisikan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran.

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang terkait implementasi kebijakan pengembangan wisata

bahari. Teori dan konsep serta berbagai penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran yang menggambarkan penelitian ini.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai metode, pendekatan, dan prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

Bab 4 Analisis Data dan Hasil Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan mengenai analisis dari setiap subtemuan penelitian yang diatur secara berurutan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan wisata bahari di kabupaten Gunung Kidul

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Pada bab terakhir, peneliti akan menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan juga memberikan rekomendasi atau saran sebagai hasil dari penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Literatur yang digunakan berbentuk buku, jurnal, laporan media cetak dan online, dan publikasi tulisan ilmiah dengan tema mengenai implementasi kebijakan pengembangan wisata bahari dan pengembangan wisata berkelanjutan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan juga keamanan lingkungan.

2.1.1. Pariwisata dan Wisata Bahari

Pariwisata atau kepariwisataan merupakan berbagai kegiatan yang terkait dengan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pariwisata bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha (UU No. 10 Tahun 2009)

Pengembangan pariwisata membutuhkan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Pengembangan pariwisata harus memperhatikan beberapa aspek sebagai penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek penunjang pengembangan pariwisata tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal dan lain sebagainya. Menurut Gunn dan Var (dalam Suardana, 2016), kawasan wisata yang baik dan berhasil secara optimal didasarkan pada empat aspek, antara lain:

- 1) Mempertahankan kelestarian lingkungan;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut;
- 3) Menjamin kepuasan pengunjung;
- 4) Meningkatkan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zona pengembangan.

Ada lima pendekatan dalam pengembangan pariwisata, yaitu:

1. *Boostern approach*, pendekatan ini merupakan pendekatan yang sederhana yang melihat pariwisata sebagai suatu akibat positif untuk suatu tempat dan penghuninya. Kekurangan dari pendekatan ini, tidak adanya pelibatan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan daya dukung wilayah tidak dipertimbangkan secara matang.
2. *The economic industry approach*, yaitu pendekatan pengembangan pariwisata dengan pertimbangan tujuan ekonomi yang didahulukan dibanding tujuan sosial dan lingkungan. Dalam pendekatan ini, pengalaman pengunjung dan tingkat kepuasan sebagai sasaran utama.
3. *The physical spatial approach*, pendekatan ini didasarkan pada tradisi penggunaan lahan geografis. Strategi pengembangan pariwisata berdasarkan perencanaan yang berbeda-beda melalui prinsip keruangan. Misalnya pengelompokan pengunjung di suatu kawasan dan pemecahan-pemecahan tersebut untuk menghindari terjadinya konflik.
4. *The community approach*, pendekatan ini lebih menekankan pada pentingnya keterlibatan maksimal dari masyarakat setempat dalam proses pengembangan wisata.
5. *Sustainable approach*, pengembangan pariwisata menggunakan pendekatan berkelanjutan dan berkepentingan atas masa depan yang panjang serta atas sumber daya dan efek-efek pembangunan ekonomi pada lingkungan yang mungkin menyebabkan gangguan budaya dan sosial yang memantapkan pola-pola kehidupan dan gaya hidup individual.

Wisata bahari merupakan jenis wisata yang memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan yang dikategorikan langsung seperti berperahu, *diving*, memancing, berenang dan lain sebagainya, sedangkan kegiatan dalam kategori tidak langsung adalah olah raga pantai, piknik menikmati wisata atmosfer laut, dan lain-lain. Wisata bahari menurut Dahuri (2004), adalah kegiatan rekreasi yang

dilakukan di sekitar pantai seperti berenang, berselancar, berjemur, berdayung, menyelam, snorkling, *beachombing/reef walking*, berjalan-jalan atau berlari sepanjang pantai, menikmati keindahan suasana pesisir dan bermeditasi.

Menurut Orams (dalam Ardiwidjaja, 2016), wisata bahari merupakan jenis wisata minat khusus yang mempunyai *kegiatan* yang berkaitan dengan kelautan, baik di atas permukaan laut (*marine*), yang dilakukan di bawah permukaan laut (*submarine*), maupun yang dilakukan di pesisir (*coastal*). Wisata minat khusus sendiri didefinisikan sebagai suatu tempat karena mempunyai minat atau tujuan khusus terhadap suatu daya tarik atraksi atau kegiatan yang ada di lokasi atau daerah tujuan wisata tersebut. Secara konseptual, wisata bahari dilandaskan pada pariwisata berkelanjutan dengan prinsip mendukung upaya-upaya konservasi lingkungan bahari (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Maka, wisata bahari merupakan suatu bentuk wisata berbasis kelautan yang mempunyai hubungan erat dengan prinsip konservasi (Ardiwidjaja, 2013). Bahkan dalam pengembangan wisata bahari juga menggunakan strategi konservasi yang mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di area yang masih alami yang terdiri dari ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, ekosistem hutan bakau dan ekosistem pantai pasir atau batu.

Menurut Ardiwidjaja (2016), sumber daya wisata bahari merupakan keseluruhan potensi sumber daya bahari yang dapat dimanfaatkan dan dikelola dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan wisata bahari. Adapun sumber daya wisata bahari meliputi:

1. Potensi atraksi dan aktivitas

Sumber daya potensi atraksi terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

- Pesisir/Pantai, antara lain: upacara adat pantai, kehidupan masyarakat pesisir, *homestay* dan kuliner, bola *volley* pantai, *Sun Bathing*, dan lain-lain.

- Permukaan laut, antara lain: kegiatan memancing, kegiatan layar dan dayung, ski air, upacara adat yang dilakukan di laut, selancar, dan *snorkeling*.
 - Bawah/dasar laut, antara lain: selam, *under water archaeology*, penelitian bawah air, dan *under water museum*.
2. Kegiatan wisata bahari yang mencakup rekreasi lainnya di wilayah perairan, antara lain: kegiatan marina; kapal wisata; kapal layar; dan pengelolaan pulau kecil
 3. Usaha penunjang kegiatan wisata bahari, antara lain jasa penyediaan moda transportasi; kapal pesiar; pengelola pulau kecil; pengelola taman laut hotel dan restoran terapung; pemandu wisata selam; serta rekreasi pantai dan lain sebagainya.

2.1.2. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*)

Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan pembangunan pariwisata yang berlandaskan pada upaya pemberdayaan baik dalam arti ekonomi, sosial, maupun kultural serta mampu menjamin kelestarian lingkungan. Ini merupakan pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan pengembangan sektor pariwisata agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan di waktu yang akan datang untuk tujuan ekonomi, sosial dan keindahan sebagai daya tarik dengan tetap menjaga integritas keanekaragaman budaya.

Organisasi pariwisata dunia (WTO) dalam UNESCO, 2000 memberikan definisi mengenai pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai berikut:

"Sustainable tourism development meets the needs of present tourists and host regions while protecting and enhancing opportunity for the future. It is envisaged as leading to management of all resources in such a way that economic, social, and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, biological diversity, and life support system."

Dengan kata lain, pembangunan pariwisata berkelanjutan berarti berkelanjutan secara ekologis, ekonomis dan sosial. Dalam pembangunannya mempertimbangkan keseimbangan lingkungan, terutama di daerah yang sensitif berdasarkan perspektif jangka panjang. Prinsip kepariwisataan berkelanjutan menurut WTO dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sumber daya alam, historis, dan budaya untuk kepariwisataan dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk masa depan dan bermanfaat bagi masyarakat
- b. Pengembangan pariwisata tidak menimbulkan masalah lingkungan dan sosio-kultural yang serius di wilayah wisata
- c. Kualitas lingkungan di wilayah wisata dipelihara dan ditingkatkan
- d. Kepuasan wisatawan dipertahankan sehingga daerah tujuan wisata akan tetap memiliki daya jual dan popularitas
- e. Manfaat dari kepariwisataan tersebar luas di seluruh masyarakat

Dalam melakukan pengembangan pariwisata berkelanjutan, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlanjutan pariwisata (Damanik dan Weber, 2006), yakni:

- a. Produk wisata didorong ke produk berbasis lingkungan
- b. Kegiatan wisata diarahkan untuk melestarikan lingkungan dan peka terhadap budaya lokal.
- c. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, implementasi dan monitoring pengembangan pariwisata
- d. Masyarakat memperoleh keuntungan secara adil dari kegiatan wisata
- e. Posisi tawar masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya pariwisata semakin meningkat.

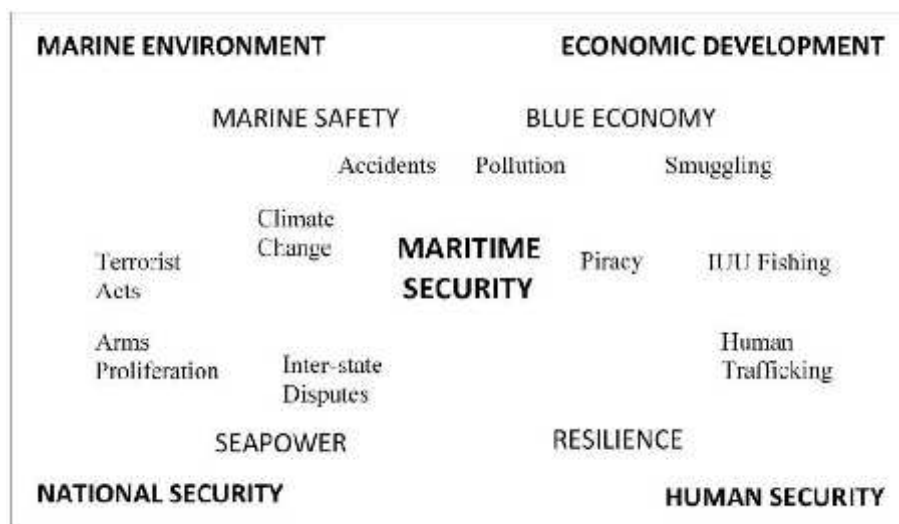
2.1.3. Konsep Keamanan Maritim

Konsep keamanan menurut Barry Buzan dapat dianalisis menurut tingkat analisisnya, seperti keamanan individu, national dan internasional dan jika dilihat dari dimensinya, keamanan mempunyai 5 dimensi yang

saling terkait yaitu dimensi militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Keamanan Individu dan komunitasnya seperti etnik, agama, suku dan kelompok lain, berhubungan dengan kualitas hubungan mereka sehingga bisa dilihat sejauh mana Negara dapat melindungi individu tersebut dan kelompoknya. Tingkat ini bisa dikaitkan dengan gagasan keamanan manusia (*Human Security*). Tingkat analisis kedua berkaitan dengan Negara, dimana didefinisikan berdaulat secara politik. Keamanan nasional atau istilah lain seperti kepentingan nasional, umumnya digunakan pemerintah untuk merasionalisasi atau mempromosikan kebijakan dan tindakan pemerintah tertentu. Secara tradisional, fokus dari keamanan nasional berkaitan dengan isu pertahanan dan strateginya. Keamanan internasional berkaitan dengan faktor-faktor sistemik yang mempengaruhi perilaku suatu Negara dan berimplikasi terhadap keamanan Negara tersebut. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan keamanan bagi masyarakatnya (Buzan, B. 1991)

Berdasarkan dimensinya, keamanan dapat dilihat dari isu militer, politik ekonomi, sosial dan lingkungan. Dimensi militer berkaitan dengan keamanan yang bersumber dari ancaman tradisional. Dimensi politik mengarah pada stabilitas organisasi pemerintah. Isu-isu keamanan politik dapat mempengaruhi pemerintah dalam melakukan pembuatan kebijakan. Dalam dimensi sosial, keamanan sosial biasa terjadi sebagai dampak dari ancaman militer dan politik. Keamanan sosial pada masyarakat lebih berfokus pada keberlangsungan hidup individu dalam melakukan interaksi dan beradaptasi dengan lingkungan baik dari aspek identitas nasional, agama, budaya, serta tradisi dan adat istiadat. Selanjutnya, keamanan ekonomi merupakan keamanan yang berhubungan dengan perdagangan, produksi dan keuangan. Aksesibilitas sumber daya, keuangan dan keadaan pasar merupakan fokus utama dari keamanan ekonomi. Dimensi yang terakhir adalah dimensi lingkungan, keamanan lingkungan merupakan perpaduan antara ancaman militer dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kedaulatan suatu Negara.

Keamanan maritim merupakan konsep dengan melakukan pendekatan dari kerangka konsep keamanan yang ada seperti konsep kerangka keamanan dari Buzan (1991). Konsep keamanan maritim ini berhubungan dengan tujuan Negara dalam menggunakan dan mengamankan sumber daya maritim yang dimiliki. Menurut Bueger (2015), keamanan maritim merupakan kondisi dimana tidak adanya ancaman yang mengganggu stabilitas di domain kemaritiman. Konsep keamanan maritim ini digambarkan ke dalam matriks yang disajikan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Matriks Keamanan Maritim
Sumber: C. Bueger (2015)

Berdasarkan gambar di atas, Christian Bueger (2015) ingin menjelaskan bahwa konsep keamanan maritim mempunyai beberapa dimensi dimana secara tradisional keamanan maritim merupakan pertahanan dan perlindungan terhadap Negara, yang berkaitan dengan peran dan strategi Angkatan Laut (*Seapower*). Selain itu, konsep keamanan maritim memiliki dimensi lain, yaitu terkait *Human Security*, Pembangunan Ekonomi dan Keselamatan Maritim.

Pariwisata bahari mempunyai kaitan erat dengan ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata bahari berkelanjutan menjadi bagian dari ekonomi biru, karena pengembangan dan pengelolaannya mempromosikan konservasi dan pemanfaatan lingkungan laut dan sumber daya secara berkelanjutan, dan juga memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal, serta memelihara budaya, tradisi dan warisan lokal. Pa-

riwisata bahari berkelanjutan mendukung konservasi daerah pesisir dan keanekaragaman hayati sehingga sumber daya alam di lingkungan maritim terlindungi dalam jangka panjang.

2.1.4. Teori Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita – cita, tujuan prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Chief J. O. Udoji (1981) mengatakan kebijaksanaan publik adalah *“An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.”* Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu dan diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan serta mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Sedangkan Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Hakim, 2002).

2.1.5. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari siklus kebijakan publik. Di dalam siklus kebijakan publik terdapat lima proses, yaitu agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Beberapa pakar mempunyai definisi mengenai kebijakan publik. Harold Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-

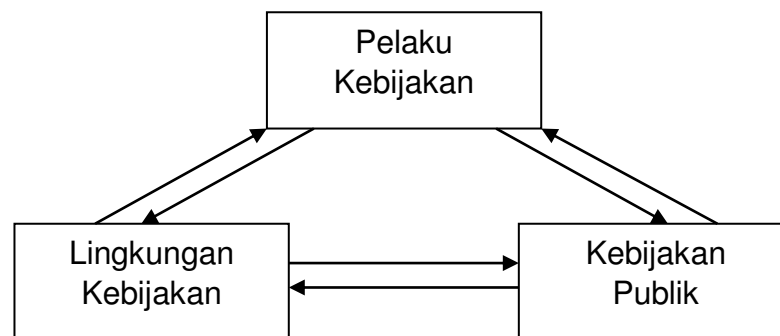
tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu. David Easton berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan akibat aktivitas pemerintah. Sedangkan Carl I. Friedrich mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dari definisi beberapa pakar tersebut dapat diambil definisi yang sederhana bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh suatu Negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan (Nugroho, 2009)

Nugroho (2009) menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar seperti UUD 1945, Undang-Undang / Perpu pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, kebijakan ini Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bersama antar Menteri, dan lain-lain.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro, adalah kebijakan yang dibuat untuk mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan tingkat menengah. Kebijakan ini berbentuk peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati dan wali kota.

William Dun (dalam Nugroho, 2009) menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditunjukkan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode

pengkajian dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik dan membangun elit teknokrat. Analisis kebijakan diletakkan pada konteks sistem kebijakan yang menurut Dun dengan mengutip Thomas R. Dye, dapat disajikan pada gambar 2.2 di bawah ini.

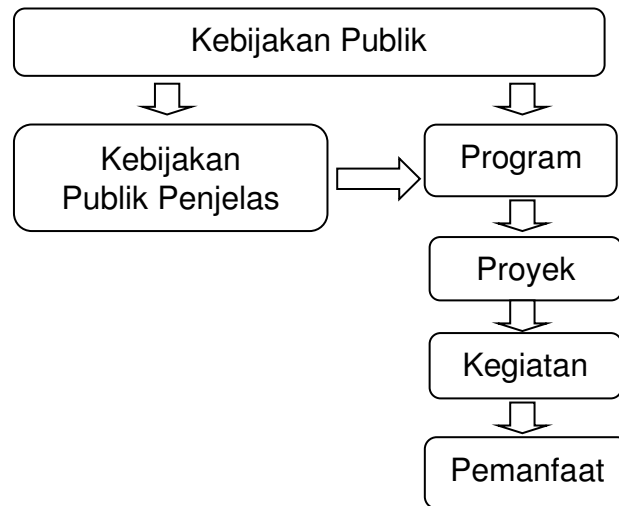


Gambar 2.2 Model Dasar Proses Kebijakan
Sumber: Nugroho, 2009

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa tiga elemen sistem kebijakan saling berhubungan dimana tiga elemen tersebut adalah kebijakan publik itu sendiri, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan tidak bisa dipisahkan dalam pembuatan kebijakan. Faktor lingkungan tersebut antara lain: karakteristik geografi, seperti: sumber daya alam, iklim, dan topografi; variabel demografi, seperti: jumlah penduduk, distribusi umur penduduk, lokasi spasial, kebudayaan politik, struktur sosial dan sistem ekonomi.

Salah satu tahap penting dalam sebuah kebijakan publik adalah implementasi, karena implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif menyangkut *output* dari kebijakan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Jadi implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau

melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat disajikan pada gambar 2.3.

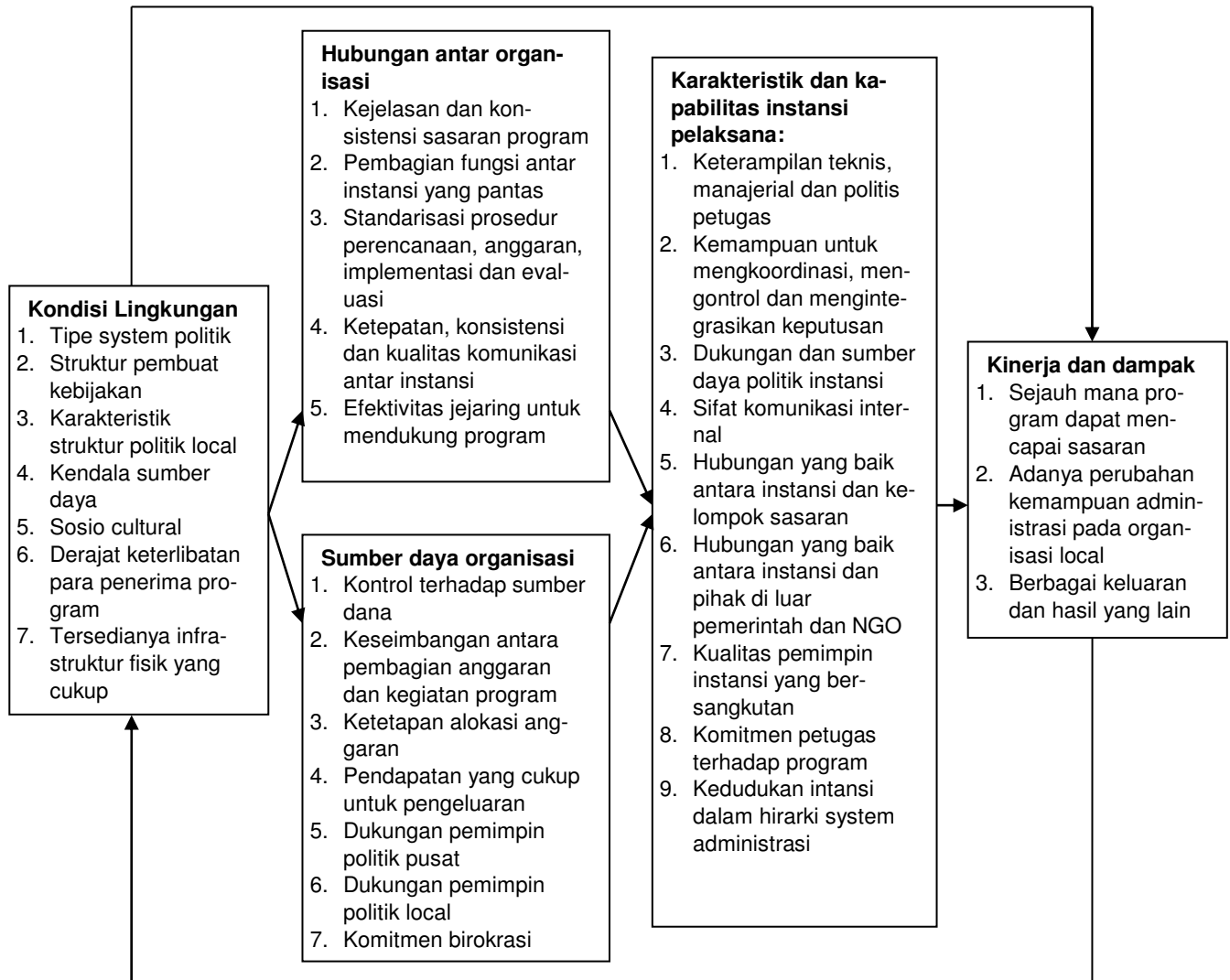


Gambar 2.3 Sekuensi Implementasi Kebijakan
Sumber: Nugroho, 2009

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik dapat diimplementasikan dalam bentuk program, proyek dan kegiatan. Beberapa kebijakan publik memerlukan kebijakan publik penjelas atau peraturan pelaksanaan, yang kemudian baru diimplementasikan dalam bentuk program, proyek dan kegiatan. Contoh kebijakan publik yang memerlukan kebijakan penjelas adalah Undang-Undang atau Perda, sedangkan kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain *Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas*, dan lain-lain.

Menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Subarsono, 2011), ada empat kelompok variabel implementasi yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yaitu: (1) Kondisi lingkungan, terdiri dari tipe sistem politik, kendala sumberdaya, tersedianya infrastuktur, kondisi di lapangan; (2) Hubungan antar organisasi, berisi kejelasan dan konsistensi sasaran program, pembangunan fungsi antar instansi yang pantas, standarisasi prosedur, efektivitas jejaring untuk mendukung program; (3) Sumber daya organisasi untuk implementasi program, terdiri dari kualitas

dan kuantitas organisasi, dukungan pemimpin politik pusat, dukungan pemimpin politik lokal, komitmen birokrasi; (4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, adalah ketrampilan teknis, manajerial, dan politis petugas, pelaksanaan berdasarkan tupoksi. Proses implementasi kebijakan dapat disajikan pada Gambar 2.4.

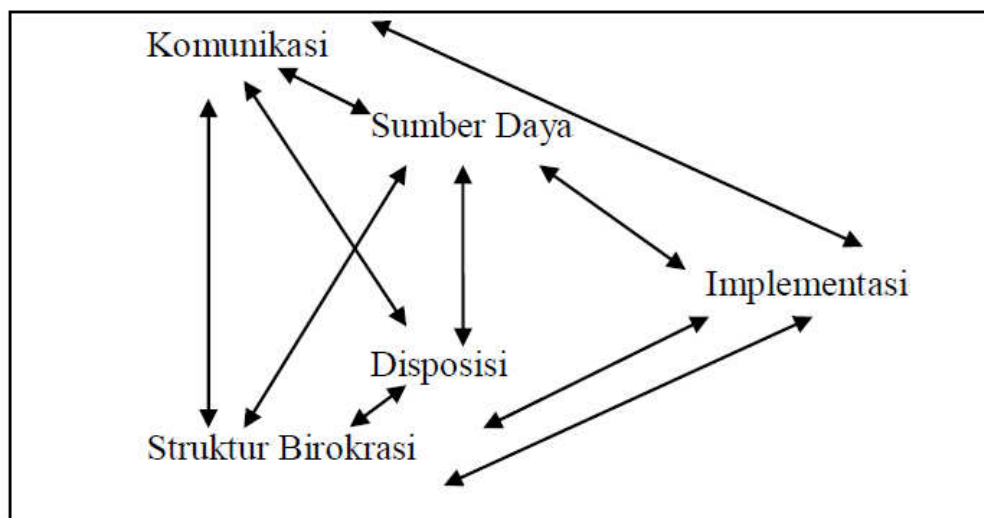


Gambar 2.4 Proses Implementasi Program
Sumber: Cheema dan Rondineli, 1983 (dalam Subarsono, 2011)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat lebih jelas mengenai proses implementasi suatu program, dimana kondisi lingkungan akan berpengaruh terhadap kinerja dan dampak suatu program tersebut. Kinerja dan dampak suatu program tidak terlepas dari karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana, dimana faktor sumber daya manusia yang handal

dapat mendukung tercapainya target kinerja yang ditentukan seperti keterampilan teknis dan manajerial, kemampuan koordinasi, kontrol, komunikasi dan lain sebagainya.

Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Model George C Edwards III Model implementasi kebijakan ini berperspektif top down. Subarsono (2011: 90) berpendapat bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berdiri sendiri namun juga saling berkaitan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini peneliti dapat menjelaskan variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:



Gambar 2.5.. Faktor penentu implementasi menurut Edward III

Sumber: Edward III (dalam Subarsono, 2011:91)

1. Komunikasi

Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi

bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, sosial dll.

Komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor-faktor yang menjadikan komunikasi tersebut berjalan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi antara lain (dalam Agustino, 2006:150-151):

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik pula.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan.
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas.

2. Sumber daya

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Faktor-faktor mengenai disposisi implementasi kebijakan oleh George C. Edward III (dalam Agustino, 2006: 152-153) antara lain:

a. Pengangkatan birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan mengakibatkan permasalahan yang akan timbul pada implementasi kebijakan jika personilnya tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan atau pengangkatan personil untuk melaksanakan kebijakan adalah orang-orang yang memiliki

dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya pada kepentingan masyarakat.

b. Insentif

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah para pelaksana cenderung melakukan manipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingannya sendiri. Manipulasi insentif yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan organisasi.

4. Strukur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja birokrasi menurut George C Edward III (dalam Agustino, 2006:153-154) yaitu:

a. Standard Operational Procedures (SOP)

SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) berdasarkan dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan masyarakat) dalam pekerjaannya.

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit-unit kerja, untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan.

Sementara itu keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi variabel besar, yakni:

1. Isi kebijakan (content of policy), yang mencakup:

- a. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan,
 - b. jenis manfaat yang diterima oleh target group,
 - c. sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan,
 - d. apakah letak sebuah program sudah tepat,
 - e. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya secara rinci,
 - f. apakah program didukung oleh sumber daya yang memadai.
2. Lingkungan implementasi (context of implementation), mencakup:
- a. seberapa besar kekuasaan,kepentingan,dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan,
 - b. karakteristik institusi dalam rejim yang sedang berkuasa,
 - c. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini penelitian dapat menjelaskan variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Isi kebijakan (*content of policy*), yang mencakup:
 - a. Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Dalam pengertian ini, kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan oleh masyarakat atau kelompok untuk memecahkan masalah yang terjadi di kehidupannya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat atau kelompok banyak sekali masalah yang membelenggu dan butuh kebijakan yang dibuat pemerintah. Disini kebijakan yang sangat dibutuhkan harus terlaksana agar mengeluarkan masyarakat dari masalah tersebut.
 - b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group. Suatu kebijakan adalah upaya untuk memperbaiki keadaan, jika keadaan yang diterima masyarakat atau kelompok tidak jauh berbeda dari sebelumnya, maka manfaat dari kebijakan tersebut tidak ada.
 - c. Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Kebijakan publik yang berhasil bukan dinilai dari isinya yang prestisius namun

implementasinya di lapangan. Apakah mampu membawa perubahan yang baik atau malah sebaliknya.

- d. Ketepatan sebuah program. Sebuah program kebijakan harus tepat agar nanti dalam implementasinya berhasil sesuai dengan harapan. Tepat disini meliputi, tepat sasaran, tepat kebutuhan, tepat lingkungan dan tepat guna.
 - e. Rincian implementor kebijakan. Kebijakan yang sudah dibuat tidak bisa dinilai keberhasilannya tanpa ada implementor atau pelaksananya. Karena peran implementor sangat penting, tanpa mereka implementasi kebijakan tidak berjalan. Implementor tak cuma satu tapi ada beberapa, maka harus lengkap karena masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda yang saling melengkapi.
 - f. Dukungan dari sumber daya yang memadai. Sumber daya manusia (implementor) harus memadai dan tahu peran dan fungsinya secara baik agar tidak keliru. Selain itu sumber daya modal harus sesuai kemampuan agar tidak terjadi kekurangan uang untuk menunjang implementasi kebijakan.
2. Konteks implementasi (*context of implementation*), mencakup:
- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat didalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini para aktor kebijakan yang jumlahnya lebih dari satu pasti memiliki pemikiran yang beraneka ragam. Sehingga masing-masing memiliki kepentingan dan strategi yang berbeda. Karena mereka terikat pada jabatan yang mereka punya. Sehingga berdampak pada kebijakan yang dibuat. Besar kecilnya tersebut ditentukan oleh jabatan yang mereka duduki.
 - b. Karakteristik institusi dalam rezim yang sedang berkuasa. Dalam politik negara nama rejim itu tergantung pada penguasa negara yang sedang menjabat. Maka perilaku dan sifat pemimpin negara dapat dilihat pada kebijakan yang dibuat. Dalam suatu rezim, institusi selaku kaki tangan kepala negara maka akan sangat nurut dengan kepala negara dan sistem yang ditentukan kepala negara.

- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dalam implementasi kebijakan publik, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena perilaku masyarakat (kelompok sasaran) sangat menentukan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan menggunakan teori dari Merilee S. Grindle untuk landasan teori penelitian ini. Selain lebih cocok menggunakan model Merilee S. Grindle, teori ini memiliki kelebihan yaitu lebih mudah dan jelas untuk digunakan untuk pembahasan penelitian ini.

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan bahan pendukung dari penelitian yang dilakukan, disajikan pada tabel 2.1, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

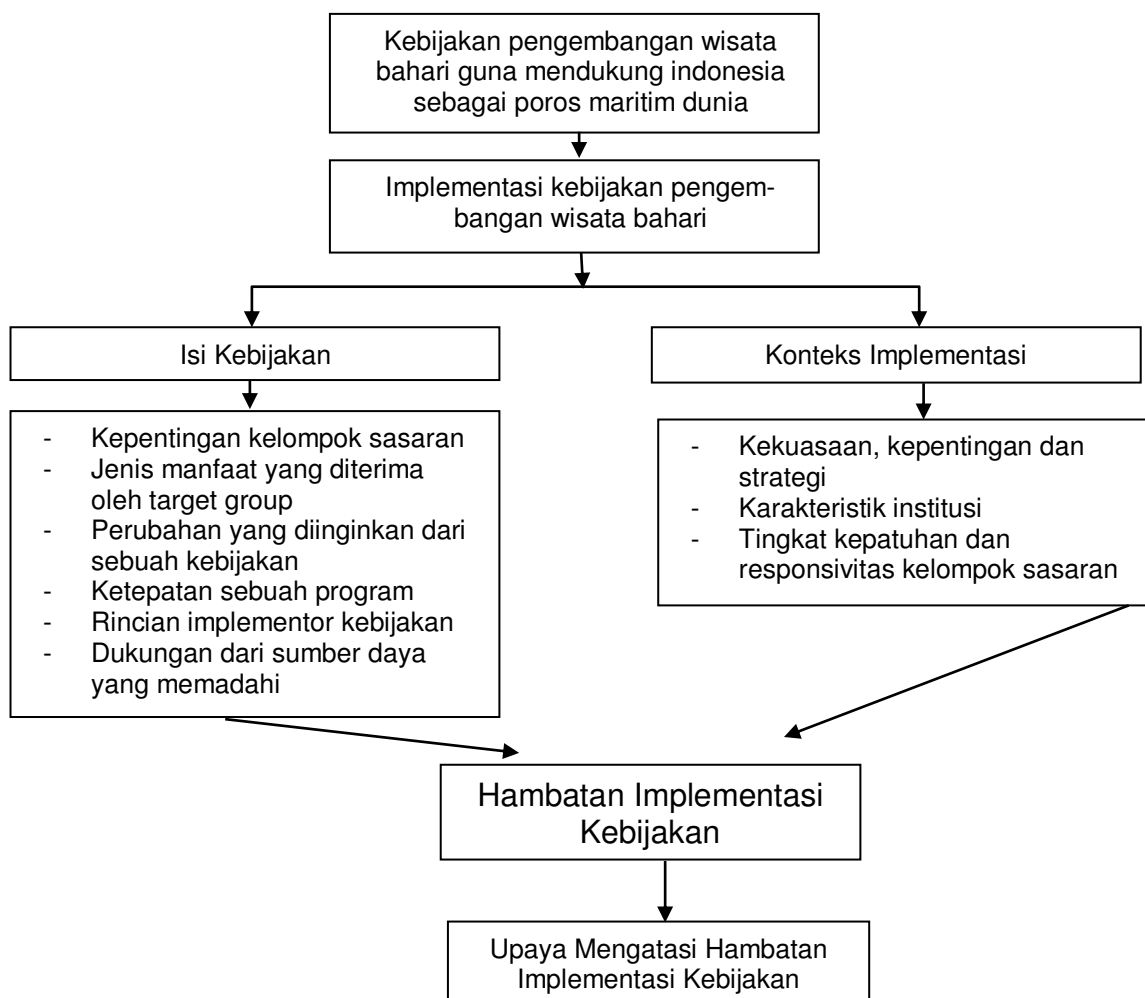
Nama Peneliti	Ayudiah Ningtyas
Judul	Pengelolaan Wisata Bahari dan Dampaknya Terhadap Keamanan Maritim di Kepulauan Seribu
Metode	Metode Kualitatif
Hasil	Hasil dari penelitian ini adalah dampak kegiatan wisata bahari terhadap keamanan maritim dapat menyebabkan kawasan wisata bahari menjadi ancaman terhadap sumber daya dari perusakan ekosistem dan meningkatkan ancaman kriminalitas.
Perbedaan dengan penelitian peneliti	Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang akan dilakukan bukan untuk menganalisis dampak terhadap keamanan maritim namun penelitian ingin menganalisis implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Gunung Kidul dalam pengembangan wisata bahari untuk mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Nama Peneliti	Feki Lahamadi, Martha Ogotan dan Very Y. Londa
Judul	Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan

	Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (<i>Suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmaera Utara</i>)
Metode	Deskriptif kualitatif
Hasil	Berdasarkan teori Edwards III implementasi kebijakan memiliki empat variabel dan hasil peneliti tentang Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pantai Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara belum berjalan dengan baik. Kenyataan ini terlihat pada birokrasi pemerintah yang kerap kali disepelekan dan hal ini membuat pengembangan objek wisata di Pantai Kumo kurang berkembang. Strategi pengembangan Pantai Kumo dari berbagai indikator harus adanya kerjasama antara pengelola kebijaksanaan (<i>stakeholder</i>) dan pelaksana kebijakan serta pengawas kebijakan agar mencapai tujuan yang diharapkan.
Perbedaan dengan penelitian peneliti	Dalam penelitian yang akan dilakukan di kabupaten Gunung Kidul dibahas mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam melakukan pengembangan wisata bahari guna mendukung indonesia sebagai poros maritim dunia
Nama Peneliti	Hadiwijaya Lesmana Salim dan Dini Purbani
Judul	Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Masyarakat di Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara
Metode	Metode analisis prospektif partisipatif, wawancara, analisis variabel kunci, membangun scenario, dan analisis strategis dan aksi antisipatif
Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel utama yang harus dititikberatkan dalam pengem-

	<p>bangun wisata bahari di Pulau Kaledupa dan sekitarnya dalam pengembangan wisata berkelanjutan, yaitu informatif, koordinasi antar instansi, dan sumberdaya alam</p>
Perbedaan dengan penelitian peneliti	<p>Penelitian ini meneliti variabel-variabel utama dalam pengembangan wisata bahari berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni meneliti tentang implementasi kebijakan pengembangan wisata bahari</p>

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model George C. Edward III. Bila digambarkan, kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian
Sumber: Diolah oleh Peneliti

Alur pikir atau kerangka pemikiran penelitian ini dilatarbelakangi sektor wisata bahari merupakan salah satu sektor maritim yang dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, adanya visi pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia mengarahkan Indonesia menjadi Negara yang maju, kuat dan mandiri di sektor maritim, termasuk wisata baharinya. Namun masih terdapat tantangan yang dihadapi, yakni: terbatasnya infrastruktur dan aksesibilitas di wilayah wisata bahari. Maka dari itu peneliti ingin menganalisis implementasi kebijakan pengembangan wisata bahari dari sisi isi kebijakan dan konteks implementasi di kabupaten Gunung Kidul.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Menurut Creswell (2009), terdapat tiga jenis metode penelitian yaitu kuantitatif, kualitatif dan campuran kuantitatif dengan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode dalam suatu penelitian untuk mengeksplorasi dan makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif digunakan ketika permasalahan belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Dalam proses penelitian kualitatif terdapat upaya-upaya untuk mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke umum, serta menafsirkan makna data. Metode kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnofrafi, *grounded theory*, studi kasus, fenomenologi dan naratif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Penelitian studi kasus dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu peristiwa, program atau aktivitas tentang perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi yang akan diteliti untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Studi kasus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengembangan wisata bahari, dimana objek yang akan diteliti berada pada lokus tertentu yakni di kabupaten Gunung Kidul.

3.2. Sumber Data, Subjek, dan Objek Penelitian

Pengumpulan data penelitian dilakukan di kabupaten Gunung Kidul, berdasarkan ketersediaan informasi dan instansi yang memiliki kaitan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.2.1. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara kepada narasumber dan observasi di lapangan. Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti

3.2.1.1 Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat oleh peneliti dari narasumber secara langsung. Data primer ini berupa data hasil wawancara dan data observasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dari beberapa informan terkait dengan informasi yang ingin digali untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti.

3.2.1.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada dan bersifat sebagai penunjang sumber primer. Sumber data sekunder berbentuk catatan, dokumentasi ataupun publikasi pemerintah dan instansi terkait, dan juga sumber informasi yang berasal dari media cetak dan internet. Data sekunder dapat berupa data-data dan dokumen-dokumen yang memberikan informasi terkait implementasi kebijakan pengembangan wisata bahari di kabupaten Gunung Kidul

3.2.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian bertindak sebagai informan atau narasumber. Narasumber ditentukan melalui *purposive sampling*, yaitu penentuan

narasumber berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai dan kapabilitas narasumber dalam permasalahan tersebut. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini terbagi dalam tiga kategori, yaitu: Pemerintah kabupaten Gunung Kidul; di luar pemerintah (non pemerintah). Subyek penelitian dari pemerintah Gunung Kidul, terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata (diwakili Kasie Sarana Wisata), Kepala Bappeda (diwakili Kasubid Pariwisata dan Penanaman Modal), komandan Lanal Yogyakarta (diwakili Pjs. Bidang Potmar), Kepala Satuan Polairud,. Subyek penelitian yang berasal dari luar pemerintah berasal dari masyarakat pesisir (pokdarwis) selatan kabupaten Gunung Kidul. Data yang diperoleh dari subyek penelitian kemudian didokumentasikan dalam bentuk transkrip, rekapitulasi data atau catatan observasi lapangan.

3.2.3. Objek Penelitian

Obyek penelitian merupakan variable yang menjadi perhatian atau yang ingin diteliti dalam suatu penelitian. Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang data dan informasi seperti program kerja, kegiatan dan aktivitas terkait pengembangan wisata bahari di kabupaten Gunung Kidul dalam mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

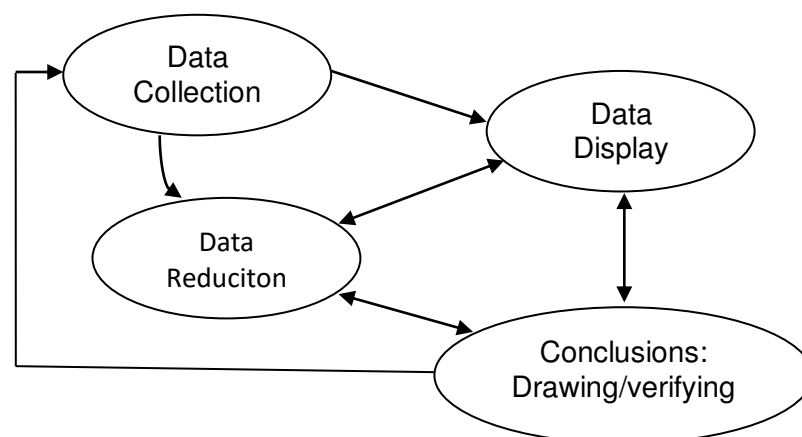
Sumber data kualitatif diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar dan percakapan informal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiganya mempunyai aspek kunci secara umum yaitu tergantung pada keterampilan interpretatif peneliti (Emzir, 2014)

Observasi dilakukan dengan pengamatan atau perhatian yang terfokus pada peristiwa atau sesuatu yang terkait dengan permasalahan penelitian. Perekaman atau pencatatan kata-kata, kejadian atau fenomena yang dihadapi, membantu peneliti dalam menghindari penafsiran yang subyektif terhadap kejadian tersebut. Dengan cara wawancara, peneliti

membuat terlebih dahulu instrumen panduan wawancara yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara *interview face-to-face* secara *semistucture*, fokus dan ter-rekam. Berikutnya dengan cara dokumentasi dimana pencarian data atau informasi yang terkait berupa laporan, dokumen, publikasi resmi dari instansi yang bersangkutan.

3.4. Teknik Analisis Data dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain, dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan dari data yang diperoleh. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiono, 2016), kegiatan analisis data kualitatif dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Proses tersebut dapat disajikan pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data
Sumber: Miles and Huberman dalam Sugiono, 2016

Berdasarkan gambar di atas, tahapan reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan dari penelitian yaitu menganalisis implementasi kebijakan pengembangan wisata bahari untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia, khususnya di Provinsi Yogyakarta.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan *flowchart*. Dengan mendisplaykan data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Tahapan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

3.5. Prosedur Penelitian

3.5.1. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dimaksud merupakan semua alat bantu utama yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini, seperti panduan wawancara, alat perekam dan lain sebagainya.

3.5.2. Pengujian dan Keterandalan Data

Reliabilitas dan validitas merujuk pada masalah kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data hasil temuan, sedangkan validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Emzir, 2014)

Pengujian keabsahan dilakukan supaya data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian. Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, yaitu: pemerintah, non-pemerintah dan ahli. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dengan cara wawancara, kemudian dicek dengan cara observasi dan dokumentasi.

Teknik uji keabsahan lain yang digunakan oleh peneliti adalah perpanjangan keikutsertaan. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan narasumber yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan teknik ini, hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan (Sugiono, 2016).

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul

4.1.1.1. Letak Geografis

Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak antara 7o 46' - 8o 09' Lintang Selatan dan 110o 21' - 110o 50' Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah di sebelah utara. Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah di sebelah timur. Samudra Hindia di sebelah selatan dan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta di sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul tercatat 1.485,36 Km² yang meliputi 18 kecamatan dan 144 desa/kelurahan. Kecamatan Semanu merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 108,39 Km² atau sekitar 7,30 persen luas Kabupaten Gunungkidul.

4.1.1.2. Topografis

Berdasarkan kondisi topografis Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu :

- a. Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200 m - 700 m di atas permukaan laut. Keadaannya berbukit-bukit, terdapat sumber-sumber air tanah kedalaman 6m-12m dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Kecamatan Ponjong bagian utara.
- b. Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150 m - 200 mdpl. Jenis tanah didominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. Sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, tetapi dimusim kemarau kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60 m - 120 m dibawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Keca-

matan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah dan Kecamatan Semanu bagian utara.

- c. Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (*Duizon gebergton* atau *Zuider gebergton*), dengan ketinggian 0 m - 300 mdpl. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (*Conical limestone*) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zone Selatan ini meliputi Kecamatan Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Kecamatan Semanu bagian selatan.

4.1.2. Sarana Dan Prasarana

Pergerakan barang dan jasa di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia, salah satunya adalah sarana jalan. Fasilitas tersebut di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 berpengaruh dalam menunjang aksesibilitas yang dibutuhkan masyarakat. Panjang jalan nasional sepanjang 61,42 Km, jalan provinsi sepanjang 260,33 Km, dan jalan kabupaten sepanjang 686 Km. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada TABEL 4.2 Kondisi jalan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2017.

Tabel 4.1. Kondisi Jalan di Kabupaten Gunung Kidul 2016-2017

Jalan	2016			2017		
	Baik	Sedang	Kurang	Baik	Sedang	Kurang
Nasional	56,11			56,11		
Propinsi	166,57	67,13	33,86	166,57	67,13	33,86
Kabupaten	418,48	48,5	219,02	431,81	48,12	206,07

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Selain sarana dan prasarana jalan, kebutuhan mendasar yang tidak kalah penting adalah penyediaan sarana dan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih hambatan utama adalah kondisi geografi Gunungkidul yang berbukit-bukit sehingga membutuhkan investasi yang cukup besar, akan tetapi Pemerintah tetap berupaya mencukupi kebutuhan air ber-

sih bagi masyarakatnya antara lain dengan memanfaatkan sumber air bawah tanah yang tersedia melimpah di Kabupaten Gunungkidul. Optimalisasi terhadap sumber air bawah tanah ini dijadikan solusi dan terus ditingkatkan pemanfaatannya untuk menghadapi permasalahan kekeringan yang datang pada musim kemarau.

4.1.3. Perekonomian

Secara makro ekonomi Kabupaten Gunungkidul perekonomiannya di dominasi sektor pertanian dalam arti luas yang berkontribusi besar terhadap pembentukan PDRB (33,84%). Prioritas utama sektor perekonomian adalah memacu pertumbuhan ekonomi berbasis usaha kecil, menengah dan industri lokal. Sektor ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak bagi sektor lainnya akan tetapi ternyata peranannya belum optimal, terbukti kontribusi PDRB Kabupaten Gunungkidul masih didominasi dari sektor pertanian. PDRB Kabupaten Gunungkidul atas dasar berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp. 7.250.682, kontribusi PDRB ini sebagian besar diperoleh dari sektor pertanian 33,84%, sektor jasa-jasa 17,30%, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran 14,60%. Upaya pengembangan sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Gunungkidul terus ditingkatkan.

Selain itu, untuk dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, sektor lain yang diharapkan propektif dapat memberikan kontribusi besar adalah sektor keuangan,sewa dan jasa perusahaan. Perkembangan sektor ini tercermin dalam meningkatnya jumlah koperasi aktif 204 unit dan pasar tradisional sebanyak 39 buah. Kondisi keuangan daerah saat ini semakin membaik, yang tercermin pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2011 sebesar Rp. 54.462.418.772,18 yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.920.387.383,57 (21,89 %) dibandingkan tahun yang lalu, sementara itu rasio PAD terhadap APBD sebesar 5,77%. Penerimaan APBD pada tahun 2012 sebesar Rp. 879.921.168.345,86, sedangkan pengeluaran rutin/belanja tidak langsung Rp. 7.746.752.304.399,84 dan pengeluaran pembangunan/belanja langsung sebesar Rp. 2328.575.807.431,5. Jumlah Dana Alokasi Khusus (pagu)

Rp. 59.168.700.000,00 dengan realisasi sampai bulan Desember 2012 sebesar Rp. 59.156.800.000 atau 99,98%.

4.1.4. Sosial Budaya

Bentuk wilayah atau fisografi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola kehidupan sosial budaya pada masyarakat. Unsur sosial budaya merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan, hal ini terkait perencanaan, sasaran, dan capaian target kinerja pembangunan. Karakteristik sosial budaya masyarakat Gunungkidul adalah masyarakat tradisional yang masih memegang teguh budaya luhur warisan nenek moyang. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah berupaya untuk mengadopsi karakteristik sosial budaya agar dapat berimprovisasi dengan kultur masyarakat yang ada. Masyarakat Kabupaten Gunungkidul secara umum menggunakan bahasa lokal (bahasa Jawa) dalam berkomunikasi, sementara bahasa nasional (bahasa Indonesia) secara resmi dipakai dalam lingkungan formal (kantor, pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain). Organisasi kesenian sebagai budaya yang terus dipupuk dan dilestarikan oleh masyarakat berjumlah 1.878 organisasi, dengan tokoh pemangku adat berjumlah 144 orang. Sementara itu desa budaya yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sebanyak 10 desa budaya, cagar budaya yang dimiliki sebanyak 5 buah serta benda cagar budaya sejumlah 692 buah yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

4.1.5. Gambaran Umum Pariwisata Gunung Kidul

Dinas pariwisata Kabupaten Gunungkidul secara garis besar membagi Kabupaten Gunungkidul menjadi 3 wilayah pengembangan (zona) berdasarkan topografi keadaan tanah, yaitu:

- a. Zona Utara (Zona Baturagung) : ketinggian 200 - 700 mdpl. Wilayah ini berpotensi sebagai objek ekowisata hutan dan alam pegunungan, meliputi : Kecamatan Patuk, Nglipar, Gedangsari, Ngawen, Semin dan Ponjong bagian Utara.
- b. Zona Tengah (Zona Ledoksari): ketinggian 150 - 200 mdpl. Wilayah ini berpotensi untuk agrowisata pertanian, meliputi Kecamatan Playen,

Wonosari, Karangmojo, Semanu bagian Selatan dan Ponjong bagian Tengah.

- c. Zona Selatan (Zona Pegunungan Seribu) ketinggian 100 - 300 mdpl. Wilayah ini berpotensi untuk wisata alam pegunungan kapur dan pantai meliputi: Kecamatan Tepus, Tanjungsari, Panggang, Purwosari, Semanu bagian selatan dan Ponjong bagian Selatan.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul masih tetap mengandalkan wisata budaya dan wisata alam. Wisata budaya terfokus pada budaya peninggalan situs-situs dan budaya adat turun-temurun seperti rasulan dan bersih desa, sedangkan wisata alam berupa pantai, goa, tebing, karst, gunung, maupun hutan.

Baru sebagian kecil kawasan wisata di Kabupaten Gunung kidul yang telah di kelola seperti Pantai Ngrehan, Baron, Kukup, Krakal, Wediombo, dan Sadeng, itupun belum optimal dikembangkan karena belum ada investor yang menanamkan modalnya di bidang pariwisata. Kawasan wisata Kabupaten Gunungkidul tidak kalah menarik dengan Pulau Bali seperti kawasan pantai yang berpasir putih, wisata khusus panjat tebing, telusur goa, dan lain-lain, hanya saja masih terkendala pada akses jalan, lokasi yang jauh dan berkelok-kelok sehingga kedepan pemerintah daerah perlu merencanakan pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Gunungkidul.

Kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kawasan karst terpanjang dan terunik di dunia, juga dapat menjadi potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata minat khusus seperti wisata alam, wisata petualangan, dan wisata ilmiah. Sehingga dalam pengusahaannya diperlukan manajemen yang bersinergi antara pemerintah, dunia perguruan tinggi, swasta dan masyarakat, untuk mewujudkan kawasan wisata yang terintegrasi dan berwawasan budaya.

Akses untuk menuju obyek daya tarik wisata Kabupaten Gunungkidul memang sangat perlu dipikirkan dan dikemas secara maksimal untuk meningkatkan dan mempermudah kunjungan wisata. Potensi dan kondisi

Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2. Kondisi ODTW di Kabupaten Gunung Kidul

No.	Obyek dan Daya Tarik Wisata	JUMLAH			TOTAL
		Sudah Berkembang	Sedang Berkembang	Belum Berkembang	
1	Pantai	5	3	12	20
2	Goa	-	3	21	24
3	Situs Sejarah	-	3	-	3
4	Hutan	1	1	-	2
5	Pegunungan Karst	-	-	27	27
Jumlah		6	10	60	76

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016, diolah

Aset unggulan pariwisata Gunungkidul hampir tak terbatas, sangat banyak jumlahnya dan beragam jenisnya, meliputi:

a. Wisata Pantai

Dari 50 lebih lokasi pantai, ada 11 yang dikelola secara resmi oleh Pemerintah Daerah sampai saat ini: Ngrenehan, Ngobaran, Nguyahan, Baron, Kukup, Drini, Krakal, Sundak, Siung, Wediombo, dan Sadeng. Sedangkan pantai-pantai lain mengedepankan pemberdayaan masyarakat, dikelola oleh Pokdarwis dan masyarakat setempat.

b. Wisata Hutan

Hutan Wanagama, Wonosadi, Bunder atau Taman Hutan Rakyat (Tahura), Lindung, Kalikidul, Wana Wisata, Watu Payung, Nampu, Linggomanik, Hutan Rakyat Klepu dan Nglanggeran, Sodong, dan Hutan Tawarsari.

c. Wisata Gunung dan Bukit

Terdiri dari kawasan Karst Gunung Sewu, Patuk atau Hargodumilah atau Bukit Bintang, Butak, Nglanggeran, Gentong, Tumpang, Batugede, Watujoli, Gambar, Bagus, Tutup, Panggung, Kendil, dan Gunung Batur.

d. Wisata Sungai dan Air Terjun

Meliputi Air Terjun Jurug Gede, Jurug Banyu Nibo, Jurug Taman Sari, Kedung Kembang, Kedung Kandang, Air Terjun Banyu Nibo, Air Terjun Sri Gethuk, Sungai Oya di berbagai wilayah, Sungai Klayar, Sungai Beton, DAM Payaman - Ngerco.

e. Wisata Goa

Goa yang sudah berkembang diantaranya Goa Pindul, Kalisuci, Jomblang dan Grubug, Cokro dan Gremeng, Jlamprong, Sinden, Ngingrong, Cerme, Songgilap, Glatik, Rancang Kencono, Senen.

f. Kawasan Wisata Minat Khusus

Segmen Karst Kalisuci, Pindul, Lembah Karst Mulo, Parangracuk, Kukup, Siung, Timang, Wediombo, Nglanggeran, Bengawan Solo Purba, Wanagama.

g. Wisata Pendidikan

Karst Pegunungan Sewu, berbagai Geo Site di kawasan Geopark Gunung Sewu khususnya Geo Area Gunungkidul.

h. Desa Wisata

Bobung, Mojo, Bejiharjo, Nglanggeran, Bleberan, Umbulrejo, Mulo, Kemadang, Ngestirejo, Wonosadi, Jelok, Pacarejo, Sundak, Turunan.

i. Wisata Buatan

Berbagai waduk dan embung di kawasan Kebun Buah Nglanggeran, Batara Sriten, Tambakromo, Monumen Radio AURI, Monumen Gelaran Jendral Sudirman, situs-situs megalitik, penelitian biota laut, hutan lindung dll.

j. Wisata Budaya dan Sejarah

Sebaran warisan budaya di berbagai wilayah berupa artefak, situs, menhir, arca, candi, petilasan, sendang, makam, resan, pendopo, tugu, rumah tradisional monumen dll. Potensi tradisi dan budaya Jawa masih dijaga teguh sebagai peninggalan leluhur bangsa di 18 Kecamatan, 144 Desa, dan 1.431 Padukuhan dengan ciri khas masing-masing.

k. Wisata Kuliner

Makanan khas Gunungkidul berupa thiwul, sayur lombok ijo, ikan laut, ikan air tawar, belalang goreng atau bacem, camilan hasil laut, Berkat

atau Brekat Dalem yaitu nasi uduk, sayur, lauk, dan ingkung ayam jantan Jawa biasa dihidangkan dalam acara bersih desa dan upacara-upacara tradisi, emping jagung, kripik tales, pathilo (seperti renginang terbuat dari ketela), lempeng, krecek, dan berbagai makanan lain dengan bahan baku dari ketela.

4.1.2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Bahari Untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta

Konsep poros maritim dunia, mengandung dimensi internasional, regional, dan domestik, serta mencakup multi sektoral dan kepentingan. Di samping itu poros maritim dunia merupakan doktrin geo politik yang akan membawa kejayaan bangsa Indonesia. Upaya memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim melalui pembangunan tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan dan pariwisata maritim (bahari) merupakan salah satu agenda yang harus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Kebijakan ini berlaku di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.1.2.1. Isi Kebijakan

Selama ini pengunjung wisata pantai di di Gunungkidul hanya cukup menikmati keindahan pantainya, padahal ada pilihan alternatif wisata yaitu wisata bahari. Wacana inilah yang sedang menjadi salah satu pengembangan potensi wisata di daerah Gunungkidul Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, mewacanakan adanya pengembangan wisata bahari yang akan terintegrasi ke Kabupaten lain seperti Bantul dan Kulon Progo.

Pengembangan wisata bahari di Kabupaten Gunungkidul merupakan implementasi dari kebijakan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dimana among tani diubah menjadi dagang layar yang artinya mengubah paradigma dari bertani berkembang ke laut. Selain pengembangan dari kebijakan tadi, konsep ini muncul dari

hasil studi banding di Raja Ampat Papua oleh dinas Pariwisata se-DIY.

1. Kepentingan kelompok sasaran

Konsep Among Tani Dagang layar merupakan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang disampaikan dalam pidato penyampaian visi misi dan program calon gubernur pada 21 September 2012 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat DIY. Menurut Hamengku Buwono X dalam penyampaian visi misi tersebut mengatakan pengertian Among Tani Dagang Layar terdiri atas tiga pengertian yaitu pembangunan daratan beralih ke lautan, menjadikan pantai selatan sebagai halaman depan, dan mengenalkan kepada masyarakat akan budaya perikanan .

Wilayah Yogyakarta yang memiliki garis pantai yaitu daerah Gunung kidul, Bantul serta Kulonprogo. Rencananya wisata bahari akan dikembangkan dengan bekerjasama dengan kedua wilayah tersebut. Rencananya Pelabuhan Pantai Sadeng akan dijadikan pintu utama sebagai gerbang jalur laut Gunung Kidul menuju Bali via Pelabuhan Karangasem, Bali. Jika wisata bahari bisa dilaksanakan, maka Pariwisata di Yogyakarta akan semakin menggeliat dan tingkat kunjungan pariwisata di Yogyakarta juga akan semakin ramai terutama untuk destinasi wisata di Gunungkidul.

Hal inilah yang kemudian mendasari munculnya visi Menyongsong Abad Samudra Hindia pada tema RPJMD DIY tahun 2017-2022 untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Salah satunya adalah potensi Laut Selatan yang ia sebut sebagai “harta karun” yang belum tergarap secara optimal. Disebut harta karun karena Samudera Hindia adalah tempat hidup bagi 2,6 miliar orang, dilewati setengah kapal kontainer dunia dan sepertiga lalu lintas kontainer dunia melewati perairan tersebut.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam pidatonya yang disampaikan di Wilson Center, Washington DC pada

22 September 2015, menekankan peran pentingnya Samudera Hindia sebagai episentrum kekuatan dunia di abad 21:

"Dari sudut pandang strategis, abad 19 ditentukan oleh Samudera Atlantik, abad 20 oleh Samudera Pasifik, dan abad 21 akan ditentukan oleh Samudera HindiaSamudera Hindia menjadi tempat tinggal bagi 2,6 miliar orang atau dua perlima jumlah penduduk dunia strategi maritim Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi harus mampu menjadi episentrum bagi Samudera Pasifik dan Samudera Hindia saat ini, separuh dari kapal kontainer dunia, sepertiga lalu-lintas kargo, dan dua pertiga pengiriman minyak dunia melalui jalur Samudera Hindia" (Marsudi, 2015).

Dalam konteks lalu lintas kegiatan yang melintas wilayah Samudera Hindia tersebut itulah, maka peran kawasan-kawasan di bagian selatan pulau Jawa yang memiliki potensi kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, menjadi sangat penting. Yogyakarta, yang memiliki wilayah garis pantai sepanjang 126 kilometer, yang mencakup tiga wilayah kabupaten, tentu juga akan memiliki posisi strategis dalam lalulintas perekonomian di wilayah Samudera Hindia.

Sedangkan khusus untuk Kabupaten Gunungkidul, pengembangan wisata bahari masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025 yang disyahkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014. Adapun visi pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Gunungkidul sebagai Destinasi Pariwisata yang unggul berbasis alam didukung budaya yang berkelanjutan, berdaya saing menuju masyarakat maju, mandiri, dan sejahtera.

Misi pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul, adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;

- b. mewujudkan Destinasi Pariwisata berbasis alam didukung budaya yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah, dan masyarakat;
- c. mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
- d. mengembangkan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul meliputi:

- a. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- c. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab; dan
- d. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Industri Pariwisata, Pembangunan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Sasaran pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul meliputi:

- a. terwujudnya Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antar usaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik Wisata yang aman dan nyaman;
- c. terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan;

- d. terwujudnya peningkatan produk domestik regional bruto di bidang Kepariwisataaan;
 - e. terwujudnya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD);
 - f. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
 - g. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisataaan yang handal;
 - h. terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional;
 - i. terwujudnya lembaga Kepariwisataaan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan Industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
 - j. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona; dan
 - k. terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group

Pelaksanaan wisata bahari akan berhasil apabila memenuhi komponen yang terkait dengan kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat yang mendiami objek wisata, kepuasan pengunjung serta keterpaduan komunitas dengan area pengembangannya. Dengan memperhatikan komponen - komponen tersebut maka wisata bahari akan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.

Pergeseran paradigma pembangunan dari “among tani” menuju ke “dagang layar” adalah sebuah cita-cita jangka panjang (ultimate goal) yang yang perlu dirintis menjadi sebuah milestone dalam jangka menengah. Konsep among tani didasari atas konsep perdagangan dan ekonomi klasik di DIY yang berkembang selama ini melalui semangat bertahan dengan basis dominasi pengembangan pertanian. Adapun semangat paradigma dagang layar merupakan konsep kemajuan kesejahteraan masyarakat berbasis perdagangan

menuju perdagangan internasional dengan strategi mutakhir, berakar kuat pada kearifan lokal, tetapi unggul dan mampu menandingi perdagangan bebas era global.

Strategi mutakhir ini adalah penerapan “*Economy Supply-Chain*” dengan harapan petani dan nelayan bisa bersatu padu, saling menolong mengatasi kelemahan, bekerjasama mencapai keunggulan. Untuk itu, petani dan nelayan sangat memerlukan kemudahan untuk mencapai pasar secara efisien dengan membangun jaringan yang sangat efektif dalam menyalurkan produk menuju pasar global maupun dunia ekspor.

Melalui paradigma *among tani dagang layar* tersebut, perekonomian daerah mampu tumbuh secara merata, berkualitas, dan berkeadilan. Artinya, paradigma tersebut sangat mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan harapan Misi ke-2 RPJMD DIY, sekaligus sebagai penajaman dari Misi ke-3 dan Misi ke-4 dari RPJPD DIY. Dalam Misi ke-2, Pembangunan DIY memang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis sektor pariwisata yang berdaya saing tinggi, namun tetap berusaha memberdayakan sektor yang tidak langsung berkaitan dengan pariwisata seperti pertanian/perkebunan/kehutanan, perikanan/kelautan dsb. untuk mencapai peningkatan dan penguatan ekonomi masyarakat Yogyakarta khususnya di Kabupaten Gunungkidul yang berada di pesisir selatan.

Menurut Kepala Subbag. Perencanaan Supriyanta, S.Sos, M.M

Saat ini pariwisata telah menjadi aktifitas yang cukup digeluti oleh masyarakat Gunungkidul, yang semula berkaraya dengan slogan *among tani, dagang lan layar*, kini dengan munculnya aktifitas pariwisata menambah lapangan kerja dan kegiatan di masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Yohanes, Kasie Sarana Wisata Dinpar Kabupaten Gunungkidul menyatakan

Dari pemerintah sebisa mungkin kita beri fasilitas dasar seperti kamar mandi, parkir, listrik, jaringan air, fasilitas dasar yang kita berikan. Sehingga nantinya masyarakat

akan dapat mandiri dan mencukupi kebutuhannya sendiri.

Dua wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan wisata bahari nantinya menambah lapangan kerja meningkatkan perekonomian warga. Sedangkan peran pemerintah untuk saat ini lebih pada penyediaan infrastruktur pariwisata. Hal ini sesuai dengan pilar ketiga pembangunan poros maritim dunia yaitu memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim

3. Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan

Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu Kabupaten yang ada di DIY memang memiliki kebijakan regional sendiri, namun secara umum kebijakannya mengacu kepada kebijakan DIY. Visi, Misi dan Program Gubernur DIY Tahun 2012-2017 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD DIY pada tanggal 21 September 2012 dengan tema “Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru” merupakan ide dasar dan pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun peradaban barunya yang unggul dengan strategi budaya: membalik paradigma ‘*among tani*’ menjadi ‘*dagang layar*’, dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*). Konsekuensinya, Laut Selatan bukan lagi ditempatkan sebagai halaman belakang, tetapi justru dijadikan halaman depan

Among Tani” menjadi “Dagang Layar” (ATDL) merupakan satu kesatuan kalimat Among Tani – Dagang Layar, tidak dipisahkan secara tegas, sehingga memiliki arti adanya kegiatan usaha pertanian (AT) dan kelautan (DL) yang dikerjakan para pemangku kepentingan secara simultan, bersama-sama, terintegrasi, dan berkolaborasi

ATDL bukan berarti terjadinya perubahan secara fisik dari petani menjadi nelayan, tetapi lebih sebagai terjadinya “shifting of mind” (pergeseran pola pikir masyarakat) bahwa potensi kelautan

yang sangat besar di bagian selatan DI Yogyakarta sudah waktunya menjadi “fokus baru” dalam upaya menyejahterakan masyarakat Yogyakarta. Jadi pemikiran semua “stakeholders” tidak hanya kearah daratan, tetapi mulai bergeser ke kelautan/bahari dengan segala bidang usahanya (bisa di darat, di laut atau kedua-duanya)

Visi, Misi dan Program Gubernur DIY Tahun 2017-2012 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD DIY untuk lima tahun kedepan adalah “ Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Tema Visi dan Misi tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan program pembangunan lima tahun kedepan, melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berkaitan dengan itu, pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih menjadikan sektor pariwisata sebagai fokus pembangunan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Pariwisata diyakini bisa menjadi ujung tombak untuk memajukan Gunungkidul dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Bappeda Gunungkidul, Syarif Armunanto, mengatakan untuk membangun pariwisata yang maju, diperlukan adanya dukungan infrastruktur, terutama adanya hotel berbintang dan mal. Untuk itu, dalam beberapa tahun mendatang, pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin menarik investor yang menginvestasikan dananya di Gunungkidul. (<http://jogja.tribunnews.com/>)

Selain akan menarik investor, dalam beberapa tahun kedepan pemerintah juga akan melakukan penataan tempat wisata serta membuka wisata baru. Tidak hanya wisata masal, namun juga akan membuka wisata kunjungan wisatawanannya akan dibatasi serta wisata budaya dengan menampilkan kesenian-kesenian.

Penataan wisata bahari Kabupaten Gunungkidul 2018 akan fokus pada Pantai Krakal dan Pantai Baron, namun hal tersebut bukan berarti mengabaikan kawasan wisata lain di Selatan. Sekretaris Dinas Pariwisata (Dinpar), Gunungkidul, Hary Sukmono mengatakan kedua

pantai itu akan jadi target awal. Pertama di Pantai Krakal, kelanjutan pekerjaan fisik, infrastruktur, termasuk kawasan parkir. Untuk di pantai Baron juga akan ada penataan. Beliau mengatakan untuk kawasan Pantai Baron aktivitas nelayan tetap menjadi ikon disana. Hal yang akan ditata beberapa menurutnya yaitu masalah limbah, drainase dan lain sebagainya.

Hary Sukmono juga mengatakan bahwa kawasan selatan juga akan dibangun rest area dalam rangka menyambut Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang diperkirakan akan semakin padat setelah bandara di Kulonprogo beroperasi. Lebih lanjut menurut beliau pembangunan wisata tidak dapat melepaskan peran serta masyarakat sekitar. Sehingga sangat perlu dukungan dari masyarakat, yang nantinya juga selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) wisata tersebut, juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lama tinggal wisatawan juga diharapkan meningkat dengan pembangunan penginapan atau hotel yang mendukung nantinya di kawasan wisata Selatan. (<http://www.solopos.com/>)

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Istidjab Danunagoro, juga mengatakan PHRI juga berupaya mendukung wisata di DIY. PHRI selalu berkordinasi dengan pengurus yang di Gunungkidul dalam rangka mendukung pengembangan wisata. Beliau mengatakan bahwa fasilitas seperti penginapan hotel berbintang sebaiknya ada dikawasan wisata Selatan Gunungkidul. Agar nantinya para wisatawan lebih bisa menikmati wisata Pantai khususnya tanpa perlu membuang banyak waktu di jalan atau macet di jalan ketika harus menginap di daerah Jogja. Agar semua segmen masyarakat terpenuhi kebutuhannya dan dalam rangka peningkatan lama tinggal wisatawan dan nantinya ada kerjasama dengan masyarakat local (<http://www.solopos.com/>)

4. Ketepatan sebuah program

Saat ini Thailand telah memulai proyek Kra-Canal Project (Terusan Kra di Thailand). Proyek ini merupakan proyek terusan raksasa yang mirip dengan Terusan Suez dan Terusan Panama, yang akan menyudet leher semenanjung Thailand-Malaysia untuk menghubungkan perairan Laut Andaman dan perairan Teluk Thailand sehingga akan memperpendek jarak pelayaran dari belahan bumi bagian barat ke negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan China (Abdul Rahman, et al, 2016). Presiden Xi pada saat berpidato di depan Parlemen Indonesia pada tahun 2013 mengangkat fenomena ini menjadi konsep “21st Century Maritime Silk Road” atau "Jalur Sutera Maritim Abad 21" dan pada bulan Januari 2017, raja baru Thailand Vajiralongkorn mengindikasikan proyek ini segera akan dibangun (Billington 2017, Larouche 2017).

Dampak dari Kra-Canal terhadap peta intensitas lalu lintas pelayaran di perairan Asia Timur dan Asia Tenggara tentu akan sangat berarti dan khusus untuk perairan Indonesia akan berdampak pada meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II (Alur Laut Kepulauan Indonesia-II yang mencakup Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok). Meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II tentu akan membawa dampak pada meningkatnya intensitas lalulintas pelayaran silang antara Asia-Australia dan Samudera Hindia-Samudera Pasifik. Pada posisi seperti itulah peran kawasan-kawasan di wilayah Pulau Jawa Bagian Selatan menjadi sangat penting terutama dalam hal penyediaan jasa pelabuhan, energi, perikanan, dan pariwisata.

Kebijakan pembangunan wisata Bahari di Kabupaten Gunung Kidul dapat dikatakan tepat sasaran karena Yogyakarta, pada hakekatnya secara geografis, ekonomi, sosiologis, kultural, dan historis ada pada posisi pusat persilangan budaya, seperti apa yang digambarkan oleh Lombard tersebut. Sifat-sifat masyarakat yang disentuh oleh peristiwa silang budaya biasanya memiliki sifat-sifat yang disebut oleh Dahana (2015) sebagai "Masyarakat Bahari" atau "Masyarakat

yang memiliki "Basic Value Kota Bandar", yakni masyarakat yang menjunjung tinggi: kesetaraan, kebebasan, toleransi, akseptansi, keterbukaan, penerimaan, persaudaraan, interkultural, multikultural, untuk kemudian menjelma menjadi sifat-sifat keseharian seperti dermawan, gotong royong, pekerja keras, jujur, tekun, dan kreatif.

Kebijakan pembangunan wisata bahari Kabupaten Gunungkidul juga dikatakan sudah tepat jika diaitkan dengan fakta sejarah sebagaimana yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam penyampaian visi misi sebagai calon gubernur DIY untuk periode jabatan 2017- 2022 di DPRD DIY bahwa nenek moyang orang Jawa telah cukup lama mengakrabi dua alam kehidupan perekonomian, yakni pertanian dan perdagangan melalui laut atau yang kita kenal sebagai among tani dagang layar. Dengan demikian, pilihan tema kemaritiman sebagai payung Kebijakan Pembangunan Lima Tahun ke depan, merupakan upaya menyambung sejarah yang telah lama diukir oleh nenek moyang.

Kebijakan pengembangan wisata bahari nantinya juga diharapkan secara ekonomi mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Hal ini dikarenakan kawasan Yogyakarta selatan khususnya di pesisir laut selatan perlu menjadi prioritas dibenahi dan dibangun perekonomiannya. Sebab, kesenjangan ekonomi di bagian Yogya selatan sangat nampak jelas yang terlihat di wilayah Kabupaten Gunungkidul (angka kemiskinan 20,83 %), Bantul (15,89 %) dan Kulon Progo (20,64 %). Angka kemiskinan di Yogya selatan ini lebih tinggi dibanding Yogya utara seperti Kabupaten Sleman (angka kemiskinan 9,5 %) dan Kota Yogya (8,67%).

5. Rincian implementor kebijakan

Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Bahari Untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia di Kabupaten Gunung Kidul dilaksanakan oleh berbagai pihak (stakeholder)

baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten yang dipertemukan dalam Musrenbang DIY.

Musrenbang RPJMD Tahun 2018 merupakan rangkaian proses strategis yang dibangun sebagai wahana untuk berdiskusi berembuk atau melakukan tukar pikiran antara pemangku kepentingan baik pemerintah akademisi swasta, LSM maupun masyarakat yang menjadi mementum penting dalam mengakomodir usulan pembangunan dari bawah sehingga diharapkan menjadi rangkaian sinergis yang akan memberikan nuansa kolaborasi dalam perencanaan pembangunan antara DIY dengan Kab/Kota secara lebih baik saling berkaitan serta memiliki indikator terarah dan terukur.

Kegiatan Musrenbang DIY dilanjutkan dengan diskusi panel oleh seluruh unsur stakeholders, baik dari kementerian terkait, unsur SKPD Pemprov dan Pemda DIY, TNI Polri, LSM serta civitas akademisi DIY dalam upaya penajaman dan pembahasan program-program kerja di tahun 2018. SKPD yang terlibat baik pada tingkat provinsi maupun Kabupaten adalah DKP (Dinas Kelautan Perikanan), Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), serta Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Pjs. Bidang Potensi Maritim, Kapten Ahmad Sugiyanto menyatakan sesuai kebijakan Pemda DIY, Lanal Yogyakarta akan membantu dan mendukung apa yang menjadi kebijakan daerah yang mengangkat wilayah selatan menjadi pintu gerbang perekonomian DIY

Pemerintah DIY mencanangkan bahwa “among tani dagang layar”, jadi jogja mencoba menyambut halaman kita laut. Kita ingin memanfaatkan laut untuk sumber kehidupan masyarakat. Masing-masing instansi bekerja sama untuk memberikan masukan-masukan agar PMD dapat dilaksanakan di bagian selatan. Maka harus ada perkuatan wilayah selatan, misalnya penambahan Pos AL, penambahan tim SAR. Instansi terkait memberikan perkuatan keamanan

Program yang sudah dikerjakan dalam membina potensi maritim, baik melalui pembinaan nelayan-nelayan dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman. Juga beberapa waktu lalu melaksanakan karya bakti terutama di Kabupaten Gunungkidul karena melihat potensi Gunungkidul sebagai salah satu penyangga di wilayah selatan. Lanal aktif bekerja sama dengan masyarakat untuk pengadaan air dengan menaikkan air di dalam gua melalui sistem pompa. Kami siapkan tendon di atas sehingga dapat mengairi beberapa dusun di sana.

Di sisi lain, pengembangan wisata bahari dapat menimbulkan potensi-potensi kerawanan baik yang berkaitan langsung dengan wisata bahari itu sendiri maupun yang berkaitan tidak langsung dengan wisata bahari seperti peningkatan intensitas kerawanan keamanan yang jika tidak diantisipasi dapat mengancam ketahanan nasional. Berikut adalah peta kerawanan yang disusun oleh Satpolair Polres Gunungkidul

PETA KERAWANAN DI PANTAI GUNUNGKIDUL SAT POLAIR



<u>PANTAL GESING</u>	<u>PANTAL NGRENEHAN</u>	<u>PANTAL BARON</u>	<u>PANTAL KUKUP</u>	<u>PANTAL KRAKAL</u>	<u>PANTAL SADENG</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. PEOPLE SMUGGLING 2. MENANGKAP IKAN DENGAN ALAT TANGKAP YG TIDAK SESUAI DGN SOP 	<p>MENANGKAP IKAN DAN UDANG MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA</p>	<p>LAKA LAUT</p>	<p>PENCURIAN TERUMBU KARANG</p>	<p>PENCURIAN PASIR LAUT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PEOPLE SMUGGLING 2. PENCURIAN IKAN DI TPI PADA SAAT BONGKAR MUATAN KAPAL IKAN

6. Dukungan dari sumber daya yang memadai

Hampanan pantai yang luas dan keanekaragaman sumberdaya laut baik sumberdaya hayati maupun sumberdaya yang lain merupakan suatu potensi bagi Kabupaten Gunungkidul untuk dikembangkan menjadi wisata bahari. Wisata bahari adalah bentuk wisata potensial.

Aktifitas wisata bahari seperti berenang, berjemur, tamasya, snorkelling, fishing, jet-skiing, fishing, berperahu, surfing, parasailing, windsurfing, berlayar, scuba diving hampir menyebar di seluruh negara ini. Dengan potensi yang demikian besar ini, pengembangan pariwisata bahari dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan. Wisata pantai termasuk pada kegiatan wisata bahari atau wisata kelautan. Adapun yang dimaksud dengan wisata pantai atau wisata bahari adalah wisata yang objek dan daya tariknya bersumber dari potensi bentang laut (*seascape*) maupun bentang darat pantai (*coastal landscape*) (Sunarto, 2000)

Secara khusus dukungan anggaran untuk pengembangan wisata bahari di Kabupaten Gunung Kidul memang tidak ada, namun secara umum kepariwisataan di Kabupaten Gunung Kidul dapat dikatakan memiliki dukungan sumber daya alam yang memadai. Bermunculnya berbagai tempat rekreasi wisata serta fasilitas akomodasi menjadi pertanda mulai bergairahnya sektor pariwisata di kabupaten ini. Gunung Kidul terkenal akan obyek wisata pantainya yang berjajar dari barat ke timur, sejauh 70 km di wilayah selatan Kabupaten Gunung Kidul.

4.1.2. Konteks Implementasi

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi

Strategi implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Bahari Untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia di kabupaten Gunung Kidul diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025. Strategi pembangunan bahari diwujudkan dalam beberapa Kawasan Strategis Pariwisata, yaitu:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata I (KSP I) berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata budaya meliputi pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Parangendog, Pantai Watu Gupit, Pantai Bekah, Pantai Grigak, Pantai Gesing, Pantai Ngungguh, Pantai Ngedan, Pantai Nguyahan, Pantai Ngobaran, Pantai Ngrenehan, Pantai Torohudan, Goa Langse, Goa Cerme, Pesanggrahan Gembirawati, Wonongobaran, Pertapaan Kembang Lampir, Sendang Beji, Cupu Panjolo, Hutan Wisata Turunan, kesenian tradisional dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
- b. Kawasan Strategis Pariwisata II (KSP II) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata kuliner olahan hasil laut meliputi pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Sanglen, Pantai Watu Kodok, Pantai Drini, Pantai Sarangan, Pantai Krakal, Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Watu Lawang, Pantai Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulang Sawal, Pantai Potunggal, Baron Agro Forestry Technopark, Goa Maria Tritis, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
- c. Kawasan Strategis Pariwisata III (KSP III) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi, dan petualangan meliputi Pantai Timang, Pantai Jogas, Pantai Siung, Pantai Wediombo, Pantai Jungwok, Pantai Sadeng, Pantai Pulau Kalong, Bengawan Solo Purba, Taman Keanekaragaman Hayati Bajo, Taman Keanekaragaman Hayati Koesnadi Hardjasoemantri, Goa Senen, Gunung Batur, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;



Gambar 4.1. Kawasan Strategis Pariwisata Gunungkidul

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Yohanis Kasie Sarana Wisata Dinpar Gunungkidul sebagai berikut:

Kebijakan pengembangan wisata bahari di Gunung kidul masuk ke dalam Ripparda Gunung Kidul, jadi memang tidak spesifik wisata bahari. Hanya kawasannya berada pada KSP 1, 2 dan 3. Ada poin tentang kawasan seperti Baron yang bercirikan wisata kuliner kemudian ada yang budaya. Jadi memang kita melihat ciri-ciri setiap wilayahnya

Wawancara di atas menunjukkan bahwa kebijakan wisata bahari Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang nantinya pembangunan kawasan pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul akan terintegrasi dengan Kabupaten lain bahkan Provinsi lain di pulau jawa. Kesatuan

inilah yang nantinya akan mendukung Indonesia menjadi poros Maritim Dunia.

2. Karakteristik institusi

Saat ini seluruh institusi pemerintah dari pusat sampai dengan daerah yang memiliki wilayah pantai dan laut harus secara bersama-sama berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia agenda pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, mem-berdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia .

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo mencanangkan lima pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia:

Lima Pilar Poros Maritim Dunia

- Pilar pertama : pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
- Pilar kedua : Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

- Pilar ketiga : Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
- Pilar keempat : Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan
- Pilar kelima : Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Cita-cita dan agenda pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. Dalam mengawal visi Laut Masa Depan Bangsa dan mendukung misi nawacita yang diamanatkan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan dengan berbagai kebijakan.

Indonesia memiliki bentang alam yang luas dan sumber daya alam yang luar biasa, dari berbagai sektor seperti pertanian, pangan, energi, dan kemaritiman yang bisa dimanfaatkan. Sektor Kemaritiman pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, guna menjaga kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Pembangunan kepariwisataan memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata. Masyarakat adalah salah satu unsur penting pemangku kepentingan untuk bersama-sama dengan Pemerintah dan kalangan usaha/swasta bersinergi melaksanakan dan mendukung pembangunan kepariwisataan. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat baik sebagai subjek atau pelaku maupun penerima manfaat pengembangan, karena dukungan masyarakat turut menentukan keberhasilan jangka panjang pengembangan kepariwisataan.

Dukungan masyarakat dapat diperoleh melalui penanaman kesadaran masyarakat akan arti penting pengembangan kepariwisataan. Untuk itu dibutuhkan proses dan pengkondisian untuk mewujudkan masyarakat yang sadar wisata. Masyarakat yang sadar wisata akan dapat memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai penting yang terkandung dalam Sapta Pesona.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya. Keberadaan Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dibina sehingga dapat berperan lebih efektif dalam turut menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.

Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Bahari Untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari respon kelompok pokdarwis tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis di Krakal, Bapak Sudarto berikut:

Saya mengetahui ada kebijakan dari Pemkab Gunung Kidul bahwa wisata pantai itu menjadi wisata andalan. Pantai selatan itu akan menjadi halaman depan dari kabupaten Gunung Kidul. Kalau dari yang saya lihat bentuk nyata kebijakan Pengembangan Wisata Bahari di Gunung Kidul itu ya seperti di Krakal sudah diberi fasilitas-fasilitas umum, dari gazebo, jogging track, patung ikon pantai Krakal, kemudian penyiapan lahan dari tahun 2014 sekitar 4 ha, jadi pemerintah sedang menyiapkan lahan untuk terminal induk, sudah dibangun kios-kios untuk merekolasi pedagang-pedagang

Namun Ketua Pokdarwis di Sadranan, Bapak Wadiyo menyatakan hal yang tidak senada sebagai berikut:

Setahu saya selama ini belum ada sosialisasi ada pengembangan atau perubahan, wacana-wacana itu belum ada sosialisasinya, jika ada penduduk akan ikut

aturan, tapi mungkin nanti ada permohonan, atau usulannya mungkin nanti direlokasi. Dulu pernah ada wacana penataan gazebo, tapi tidak jadi, mungkin karena memang wisatawan butuh gazebo-gasebo yang dibangun ini. Bentuk nyatanya belum ada, seperti fasilitas parkir juga kelompok yang membuat sendiri, dan masyarakat/kelompok bekerjasama dengan pengelola parkir yang menjadi masalah bagi kami adalah pengelolaan sampah. Penanganan sampah pun masyarakat yang menanganinya sendiri. Dan setahu saya, terkait kebijakan yang disebut tadi memang ada undangan rapat dari dinas, namun belum ada tindak lanjut dari pemerintah

Berdasarkan dua wawancara di atas, dapat diketahui bahwa sebenarnya dari masyarakat sendiri tidak ada penolakan terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengembangkan wisata bahari, hanya saja selama ini sosialisasinya masih terbatas pada daerah-daerah tertentu dan belum merata. Bahkan masyarakat juga merasa peran pemerintah dalam mengembangkan wisata di daerahnya belum optimal dan bahkan belum terasa sebagaimana wawancara dengan Ketua Pokdarwis di Krakal, Bapak Sudarto berikut:

Jadi dinas-dinas terkait, tapi ketika pemerintah mau membuat apa, kami (pokdarwis) selalu diundang dan diberitahu. Masyarakat dilibatkan dalam pelayanan wisatanya. Namun apa yang dilakukan pemerintah belum maksimal, malah baru mulai. Tempat wisata sudah terkenal tapi pemerintah baru ikut bertindak. Bicara soal manfaat ya kalo kebijakan berbasis masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, itu pasti sangat bermanfaat bagi kami. Fasilitas-fasilitas yang dibangun juga bermanfaat juga dapat dirasakan untuk pengunjung disini dan menambah ramai kunjungan wisata

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tanggapan masyarakat terhadap program pengembangan wisata bahari Kabupaten Gunungkidul sangat baik. Mereka juga memiliki inisiatif yang tinggi untuk meningkatkan kunjungan wisata ke daerahnya. Namun memang sebaiknya masih dibutuhkan peran pemerintah yang besar agar pengembangan wisata bahari yang dil-

akukan lebih tertata dengan baik dan sesuai dengan cita-cita nasional yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,

4.2. Pembahasan

Wisata bahari merupakan jenis wisata minat khusus yang mempunyai *kegiatan* yang berkaitan dengan kelautan, baik di atas permukaan laut (*marine*), yang dilakukan di bawah permukaan laut (*submarine*), maupun yang dilakukan di pesisir (*coastal*). Wisata minat khusus sendiri didefinisikan sebagai suatu tempat karena mempunyai minat atau tujuan khusus terhadap suatu daya tarik atraksi atau kegiatan yang ada di lokasi atau daerah tujuan wisata tersebut. Secara konseptual, wisata bahari dilandaskan pada pariwisata berkelanjutan dengan prinsip mendukung upaya-upaya konservasi lingkungan bahari (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Maka, wisata bahari merupakan suatu bentuk wisata berbasis kelautan yang mempunyai hubungan erat dengan prinsip konservasi (Ardiwidjaja, 2013). Bahkan dalam pengembangan wisata bahari juga menggunakan strategi konservasi yang mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di area yang masih alami yang terdiri dari ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, ekosistem hutan bakau dan ekosistem pantai pasir atau batu.

Temuan lapangan terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wisata bahari di Provinsi Yogyakarta untuk mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia menunjukkan bahwa :

1. Isi Kebijakan

Pengembangan wisata bahari di Kabupaten Gunung Kidul merupakan implementasi dari kebijakan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dimana among tani diubah menjadi dagang

layar yang artinya mengubah paradigma dari bertani berkembang ke laut.

Pelaksanaan wisata bahari nantinya menambah lapangan kerja meningkatkan perekonomian warga. Sedangkan peran pemerintah untuk saat ini lebih pada penyediaan infrastruktur pariwisata. Hal ini sesuai dengan pilar ketiga pembangunan poros maritim dunia yaitu memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Kebijakan pembangunan wisata Bahari di Kabupaten Gunung Kidul dapat dikatakan tepat sasaran karena Yogyakarta, pada hakekatnya secara geografis, ekonomi, sosiologis, kultural, dan historis ada pada posisi pusat persilangan budaya

Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Bahari Untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh berbagai pihak (stakeholder) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten yang dipertemukan dalam Musrenbang DIY. Kegiatan Musrenbang DIY pada Tahun 2018. Secara umum kepariwisataan di Kabupaten Gunung Kidul dapat dikatakan memiliki dukungan sumber daya alam yang memadai.

Namun di sisi lain, penembangan wisata bahari dapat menimbulkan potensi-potensi kerawanan baik yang berkaitan langsung dengan wisata bahari itu sendiri maupun yang berkaitan tidak langsung dengan wisata bahari seperti peningkatan intensitas kerawanan keamanan yang jika tidak diantisipasi dapat mengancam ketahanan nasional.

2. Konteks Implementasi

Strategi implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Bahari Untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia di Gunung Kidul diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten

Gunung Kidul Tahun 2014-2025. Strategi pembangunan bahari diwujudkan dalam beberapa Kawasan Strategis Pariwisata

Strategi implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Bahari Untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia di Daerah Istimewa Yogyakarta diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025. Strategi pembangunan bahari diwujudkan dalam beberapa Kawasan Strategis Pariwisata

Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Bahari Untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari respon kelompok pokdarwis yang ada di Kabupaten Gunungkidul yang mana mereka sangat mendukung adanya kebijakan pemerintah tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai menegaskan bahwa pariwisata bahari mempunyai kaitan erat dengan ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata bahari berkelanjutan menjadi bagian dari ekonomi biru, karena pengembangan dan pengelolaannya mempromosikan konservasi dan pemanfaatan lingkungan laut dan sumber daya secara berkelanjutan, dan juga memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal, serta memelihara budaya, tradisi dan warisan lokal. Pariwisata bahari berkelanjutan mendukung konservasi daerah pesisir dan keanekaragaman hayati sehingga sumber daya alam di lingkungan maritim terlindungi dalam jangka panjang.

Hal ini sesuai dengan pendapat Christian Bueger (2015) tentang konsep keamanan maritim yang mempunyai beberapa dimensi dimana secara tradisional keamanan maritim merupakan pertahanan dan perlindungan terhadap Negara, yang berkaitan dengan peran dan strategi Angkatan Laut (Seapower). Selain itu, konsep keamanan maritim memiliki dimensi lain, yaitu terkait Human Security, Pembangunan Ekonomi dan Keselamatan Maritim.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wisata bahari di Provinsi Yogyakarta untuk mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat dilihat dari sisi :

1. Isi Kebijakan

Pengembangan wisata bahari di Kabupaten Gunungkidul merupakan implementasi dari kebijakan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dimana among tani diubah menjadi dagang layar yang artinya mengubah paradigma dari bertani berkembang ke laut.

Namun di sisi lain, pengembangan wisata bahari dapat menimbulkan potensi-potensi kerawanan baik yang berkaitan langsung dengan wisata bahari itu sendiri maupun yang berkaitan tidak langsung dengan wisata bahari seperti peningkatan intensitas kerawanan keamanan yang jika tidak diantisipasi dapat mengancam ketahanan nasional.

2. Konteks Implementasi

Strategi implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Bahari Untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia di Gunung Kidul diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Bahari Untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari respon kelompok pokdarwis yang ada di Kabupaten

Gunungkidul yang mana mereka sangat mendukung adanya kebijakan pemerintah tersebut.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Dinas Pariwisata
 - a. Memaksimalkan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dengan membuat kebijakan khusus terkait pengembangan wisata bahari
 - b. Meningkatkan kompetensi dan kualitas masyarakat lokal mengenai wisata bahari
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pariwisata pesisir Kabupaten Gunungkidul dari segi pelayanan masyarakat, jumlah kunjungan, kepuasan wisatawan, dan kondisi lingkungan (SDA).
2. Masyarakat
 - a. Perlunya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kelestarian pantai sebagai destinasi wisata bahari
 - b. Membuat sebuah lembaga masyarakat atau kelompok sadar wisata tingkat Kabupaten dengan struktur organisasi yang jelas dan terbagi dalam beberapa kelompok kerja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Buzan, B. 1991. *People, States, and Fear Second Edition: An Agenda International Security Studies in The Post-Cold War Area*. Harlow: Prentice Hall.
- Cresswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches-3rd Edition*. United Kingdom: SAGE Publication, Inc.
- Damanik, Janianton dan Helmut F. Weber. 2006. *Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Emzir. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, R. 2009. *Public Policy*. Jakarta :PT. Elex Media Komputindo.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

TESIS

- Ningtyas, A. 2016. *Pengelolaan Wisata Bahari Dan Dampaknya Terhadap Keamanan Maritim Di Kepulauan Seribu*. Tesis. Universitas Pertahanan. Bogor

JURNAL

- Abdilah, D. 2016. *Pengembangan Wisata Bahari di Pesisir Pantai Teluk Lampung*. Kementerian Pariwisata. Jurnal Destinasi Kepariwisata Indonesia Vol. 1 No.1

Bueger, C. 2015. *What is Maritime Security. Department of Politics and International Relations*. Dipetik Agustus 8, 2017, dari <http://bueger.info/wp-content/uploads/2014/12/Bueger-2014-What-is-Maritime-Security-final.pdf>

Lahamadi, L., Ogotan, M., dan Londa, Y. 2018. Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo. (<https://media.neliti.com/media/publications/72482-ID-implementasi-kebijakan-dinas-pariwisata.pdf>)

Salim dan Purbani, 2015. Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Masyarakat di Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir, KKP, Jakarta.

Suardana, I. W. 2016. *Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata. Jurnal Seminar Nasional*. Universitas Udayana.

UNESCO, 2000. Sustainable Tourism Development In UNESCO Designated Sites in South-Eastern Europe. Dipetik Oktober 1, 2017, dari http://portal.unesco.org/es/files/45338/12417872579Introduction_Sustainable_Tourism.pdf/Introduction_Sustainable_Tourism.pdf

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.

WEBSITE

Kementerian Pariwisata, 2016. Paparan Kementerian Pariwisata RI untuk KIDI ke-6 2016. Dipetik Oktober 1, 2017, dari <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Paparan%20Kemenpar%20untuk%20KIDI%202016.pdf>

Gubernur DIY, 2015. Capaian Implementasi Empat Fokus Area Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam Indo-

nesia Sektor Kelautan Di Diy. Dipetik Oktober 2, 2017, dari
[https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/semarang/05-
PAPARAN-DIY-SEKTOR-KELAUTAN.pdf](https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/semarang/05-PAPARAN-DIY-SEKTOR-KELAUTAN.pdf)

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari dalam Mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (Studi di Provinsi Yogyakarta)

Narasumber

1	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul
	Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta
2	Pemda Kabupaten Gunung Kidul
	Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunung Kidul
3	Lanal Yogyakarta
	Komandan Lanal Yogyakarta
4	Polairud Kabupaten Gunung Kidul
	Kepala Satuan Polairud Gunung Kidul
5	Kelompok Sadar Wisata di Gunung Kidul
	Ketua Pokdarwis

1. Isi kebijakan (*content of policy*),
 - a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kebijakan Pengembangan Wisata Bahari di Gunung Kidul?
 - b. Jika tahu apakah Pengembangan Wisata Bahari di Gunung Kidul sudah memenuhi kepentingan masyarakat?
 - c. Jenis manfaat apakah yang diterima oleh masyarakat ?
 - d. Perubahan yang diinginkan dari kebijakan Pengembangan Wisata Bahari di Gunung Kidul.
 - e. Apakah kebijakan Pengembangan Wisata Bahari di Gunung Kidul tepat sasaran, tepat kebutuhan, tepat lingkungan dan tepat guna.?
 - f. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan Pengembangan Wisata Bahari di Gunung Kidul?

- g. Apakah dukungan dari sumber daya manusia dan keuangan terhadap pelaksanaan kebijakan Pengembangan Wisata Bahari di Gunung Kidul sudah memadai?
2. Konteks implementasi (*context of implementation*),
- a. Bagaimanakah strategi yang instansi Bapak/Ibu dimiliki untuk melaksanakan kebijakan Pengembangan Wisata Bahari di Gunung Kidul
 - b. Apakah pelaksanaan kebijakan Pengembangan Wisata Bahari di Gunung Kidul bersifat jangka pendek atau jangka panjang?
 - c. Bagaimanakah tingkat responsivitas masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan Pengembangan Wisata Bahari di Gunung Kidul?

LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP MASYARAKAT

1. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan Pengembangan Wisata Bahari di Gunung Kidul?
2. Jika tahu apa bentuk nyata kebijakan Pengembangan Wisata Bahari di Gunung Kidul itu?
3. Apakah anda tahu siapa saja yang terlibat dalam kebijakan Pengembangan Wisata Bahari di Gunung Kidul?
4. Bagaimanakah kebijakan Pengembangan Wisata Bahari di Gunung Kidul yang sudah berjalan selama ini?
5. Apakah anda merasakan manfaat dari kebijakan Pengembangan Wisata Bahari di Gunung Kidul?